



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 48 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, mendinamiskan sistem kearsipan yang sesuai dengan perkembangan, dan keseragaman pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menyelenggarakan kearsipan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:



1. Arsip Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga Kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang Kearsipan yang berkedudukan di ibukota Negara.
4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang.
6. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
8. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga Kearsipan.
9. Arsip Terjaga adalah Arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

10. Arsip Elektronik adalah Arsip yang diciptakan, dibuat, atau diterima serta disimpan dalam format elektronik.
11. Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip Vital pencipta Arsip pada saat darurat atau setelah musibah.
12. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
13. Pola Klasifikasi adalah suatu pola atau bagan yang berupa daftar pengelompokan subyek yang dibuat secara berjenjang berdasarkan tugas dan fungsi organisasi dan dibuat secara logis dan sistematis.
14. Kode Klasifikasi adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga Kearsipan.
16. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi mengenai penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman Penyusutan Arsip dan penyelamatan Arsip.
17. Pemusnahan Arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik Arsip yang sudah berakhir fungsinya serta yang tidak memiliki nilai guna.
18. Berkas adalah suatu himpunan Arsip yang dapat ditata secara dossier, rubrik, atau seri.



19. Indeks adalah tanda pengenal Arsip yang merupakan alat bantu dalam penemuan kembali Arsip.
20. Tunjuk Silang adalah alat yang berfungsi menghubungkan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi, dapat dituangkan atau ditulis baik dalam folder maupun dalam bentuk lembaran yang diletakkan dalam folder.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
23. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
24. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan secara menyeluruh dilingkungan Kementerian.
25. Unit Kearsipan I adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Kearsipan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian.
27. Unit Kearsipan II adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal dan unit kerja pada sekretariat pimpinan tinggi madya Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan unit kerja pimpinan tinggi madya masing-masing.
28. Unit Kearsipan III adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan unit pelaksana teknis.
29. Unit Pengolah adalah unit kerja yang berada pada Unit Kearsipan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
30. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui

pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab melaksanakan tugas Kearsipan.

31. Pencipta Arsip adalah Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
32. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
33. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
34. Fumigasi adalah suatu tindakan untuk mencegah kerusakan fisik Arsip lebih lanjut dapat dihindari, mengobati, atau mematikan faktor perusak biologis dan mensterilkan keadaan Arsip agar tidak bau busuk serta menyegarkan udara agar tidak menimbulkan penyakit terhadap manusia.
35. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian prinsip, kaidah, dan standar Kearsipan dengan penyelenggaraan Kearsipan.
36. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Kearsipan.
37. Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya disingkat LAKI adalah laporan yang disusun oleh pimpinan Pencipta Arsip berdasarkan hasil audit sistem Kearsipan internal dan/atau laporan hasil audit pengelolaan Arsip Aktif yang dilaksanakan di lingkungannya.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian bertujuan untuk:



- a. menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian;
- b. menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan melalui pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. mendinamiskan penyelenggaraan Kearsipan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban; dan
- g. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya.

### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian, meliputi:

- a. kebijakan Kearsipan;
- b. pengelolaan Arsip;
- c. sumber daya Kearsipan;
- d. Pengawasan Kearsipan; dan
- e. pembinaan Kearsipan.

## BAB II

### KEBIJAKAN KEARSIPAN

### Pasal 4

Kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan Kearsipan yang

- komprehensif dan terpadu untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya;
- c. menjamin perlindungan kepentingan negara;
  - d. mendinamiskan sistem Kearsipan; dan
  - e. penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar Kearsipan sebagaimana dibutuhkan penyelenggaraan Kearsipan yang andal.

### BAB III PENGELOLAAN ARSIP

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

##### Pasal 6

Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap Arsip Dinamis.

##### Pasal 7

Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan:

- a. penciptaan Arsip;
- b. penggunaan Arsip;
- c. pemeliharaan Arsip; dan
- d. Penyusutan Arsip.

#### Bagian Kedua Penciptaan Arsip

##### Pasal 8

- (1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:



- a. pembuatan Arsip; dan
  - b. penerimaan Arsip.
- (2) Pembuatan Arsip dan penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. tata naskah dinas di lingkungan Kementerian; dan
  - b. Pola Klasifikasi dan keamanan Akses Arsip Dinamis.

#### Pasal 9

- (1) Pembuatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, harus dilakukan pencatatan.
- (2) Arsip yang telah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan kepada pihak yang berhak secara tepat waktu, lengkap, dan aman.
- (3) Arsip yang telah didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tindakan pemantauan oleh Pencipta Arsip.

#### Pasal 10

- (1) Penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berwenang menerima.
- (2) Arsip yang telah diterima secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh pihak penerima.
- (3) Arsip yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Unit Pengolah untuk dilakukan tindakan pengendalian.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembuatan Arsip dan penerimaan Arsip, Unit Kearsipan dan Unit Pengolah mendokumentasikan kegiatan pencatatan pembuatan Arsip dan penerimaan Arsip.

- (2) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keaslian Arsip yang diciptakan berdasarkan tata naskah dinas.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Arsip

Pasal 12

- (1) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- (2) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi kepentingan unit kerja di lingkungan Kementerian dan kepentingan publik.
- (3) Dalam rangka penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pimpinan Pencipta Arsip bertanggung jawab atas ketersediaan dan autentisitas Arsip;
  - b. pimpinan Unit Pengolah bertanggung jawab atas pengolahan dan pelayanan penyajian Arsip Vital dan Arsip Aktif; dan
  - c. pimpinan Unit Kearsipan bertanggung jawab atas pengolahan dan pelayanan penyajian Arsip Inaktif yang dikelola untuk kepentingan penggunaan, di lingkungan Kementerian dan kepentingan publik.

Bagian Keempat  
Pemeliharaan Arsip

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertujuan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip.
- (2) Menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:



- a. memastikan Arsip yang tercipta atau yang akan tercipta dapat diberkaskan sesuai dengan Klasifikasi Arsip;
- b. memastikan Arsip yang diberkaskan lengkap sebagai suatu keutuhan kegiatan dan tidak mengalami perubahan secara fisik dan informasinya sampai dengan tahap penyusutan;
- c. memastikan Arsip yang diberkaskan memiliki Kode Klasifikasi yang tepat dan disimpan sesuai dengan Klasifikasi Arsip;
- d. memastikan penggunaan sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip secara konsisten; dan
- e. memastikan Arsip ditata dan disimpan dengan menggunakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan standar Kearsipan.

#### Pasal 14

Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan Arsip Aktif;
- b. program Arsip Vital;
- c. pemeliharaan Arsip Inaktif;
- d. alih media Arsip; dan
- e. Fumigasi.

#### Pasal 15

- (1) Pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah.
- (2) Pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberkasan Arsip Aktif; dan
  - b. penyimpanan Arsip Aktif.
- (3) Pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan standar Kearsipan.

- (4) Prasarana dan sarana Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari folder, sekat (*guide*), label, *out indicator*, Indeks, Tunjuk Silang, boks, *filing cabinet*, dan rak Arsip.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemeliharaan Arsip Aktif, Unit Pengolah membentuk sentral Arsip Aktif.
- (2) Sentral Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Unit Pengolah setingkat pimpinan tinggi pratama, administrator, atau satuan kerja mandiri sesuai dengan beban volume Arsip yang dikelola.

#### Pasal 17

- (1) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Arsip yang dibuat dan diterima.
- (2) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Arsip.
- (3) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. prosedur pemeriksaan;
  - b. penentuan Indeks;
  - c. penentuan kode;
  - d. Tunjuk Silang apabila ada;
  - e. pelabelan; dan
  - f. penyusunan daftar Arsip Aktif.

#### Pasal 18

- (1) Pemberkasan Arsip Aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi Arsip serta tersusunnya daftar Arsip Aktif.
- (2) Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. daftar Berkas; dan
  - b. daftar isi Berkas.

- (3) Daftar Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. Unit Pengolah;
  - b. nomor Berkas;
  - c. Kode Klasifikasi;
  - d. uraian informasi Berkas;
  - e. kurun waktu;
  - f. jumlah; dan
  - g. keterangan.
- (4) Daftar isi Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. nomor Berkas;
  - b. nomor item Arsip;
  - c. Kode Klasifikasi;
  - d. uraian informasi Arsip;
  - e. tanggal;
  - f. jumlah; dan
  - g. keterangan.
- (5) Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai sarana bantu penemuan kembali Arsip.

#### Pasal 19

- (1) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a menyampaikan daftar Arsip Aktif kepada Unit Kearsipan II dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kembali keseluruhan daftar Arsip Aktif dari seluruh unit kerja di lingkungannya kepada Unit Kearsipan I setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan penyampaian daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Unit Pengolah melakukan penyimpanan Arsip Aktif



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yang sudah di daftar dalam daftar Arsip Aktif.

- (2) Penyimpanan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Arsip Aktif yang sudah didaftar dalam daftar Arsip Aktif.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Arsip Aktif yang disimpan Unit Pengolah telah melewati retensi Arsip Aktif dan memasuki retensi inaktif berdasarkan JRA, Unit Pengolah harus melaksanakan pemindahan Arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan melampirkan daftar Arsip yang akan dipindahkan.
- (3) Berita acara dan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah dan pimpinan Unit Kearsipan pada tiap Pencipta Arsip.
- (4) Pemindahan Arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyusutan Arsip.

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 23

- (1) Program Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b di lingkungan Kementerian dilaksanakan dalam rangka pengelolaan,

perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan Arsip Vital yang tercipta.

- (2) Pimpinan Unit Pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan penyajian Arsip Vital.
- (3) Program Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. prosedur pengelolaan;
  - b. perlindungan dan Pengamanan Arsip;
  - c. penyelamatan dan pemulihan; dan
  - d. penyimpanan.

#### Pasal 24

- (1) Prosedur pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi;
  - b. penataan; dan
  - c. menyusun daftar Arsip Vital yang ada di Unit Pengolah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. analisis organisasi;
  - b. pendataan;
  - c. pengolahan; dan
  - d. penentuan Arsip Vital.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan;
  - b. penentuan Indeks Berkas;
  - c. penggunaan Tunjuk Silang; dan
  - d. pelabelan dan penempatan Arsip.

#### Pasal 25

- (1) Perlindungan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. metode perlindungan;
  - b. pengamanan fisik; dan
  - c. pengamanan informasi.

- (2) Metode perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. duplikasi;
  - b. pemencaran; dan
  - c. penggunaan peralatan khusus (*vaulting*).
- (3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sistem keamanan ruang penyimpanan;
  - b. tingkat ketinggian penempatan;
  - c. struktur bangunan; dan
  - d. penggunaan ruang.
- (4) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. memastikan penggunaan Arsip oleh pihak yang berhak;
  - b. member kode rahasia; dan
  - c. menetapkan spesifikasi hak akses.

#### Pasal 26

- (1) Penyelamatan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. penyelamatan; dan
  - b. pemulihan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. evakuasi Arsip Vital;
  - b. identifikasi jenis Arsip; dan
  - c. pemulihan kondisi.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. stabilisasi dan perlindungan Arsip yang dievakuasi;
  - b. penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuhan pemulihan;
  - c. pelaksanaan penyelamatan;
  - d. prosedur penyimpanan kembali; dan
  - e. evaluasi.



Pasal 27

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d dilakukan pada tempat khusus yang dapat mencegah atau menghambat unsur perusak fisik Arsip dan sekaligus mencegah pencurian informasinya.
- (2) Lokasi penyimpanan Arsip Vital dapat dilakukan secara:
  - a. *on site*; atau
  - b. *offsite*.
- (3) Penyimpanan Arsip Vital *on site* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kegiatan penyimpanan Arsip Vital yang ditempatkan pada ruangan tertentu dalam satu gedung atau perkantoran dalam lingkungan Pencipta Arsip.
- (4) Penyimpanan Arsip Vital *offsite* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kegiatan penyimpanan Arsip Vital yang ditempatkan di luar lingkungan gedung perkantoran Pencipta Arsip.

Pasal 28

Ketentuan mengenai program Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Kearsipan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif.
- (3) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan standar Kearsipan.

- (4) Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Unit Pengolah yang telah melewati retensi aktif dan memasuki retensi inaktif berdasarkan JRA.

#### Pasal 30

Dalam melaksanakan pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Unit Kearsipan sesuai kewenangannya harus menyediakan ruang yang difungsikan untuk sentral Arsip Inaktif atau gedung sentral Arsip Inaktif.

#### Pasal 31

- (1) Penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip asal-usul dan prinsip aturan asli.
- (2) Penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga Arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya, tetap terkelola dalam satu Unit Pengolah, dan tidak dicampur dengan Arsip yang berasal dari Unit Pengolah lain.
- (3) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pengaturan fisik Arsip;
  - b. pengolahan informasi Arsip; dan
  - c. penyusunan daftar Arsip Inaktif.
- (4) Penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Arsip yang sudah didaftar dalam daftar Arsip Inaktif.
- (5) Penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi Arsip selama jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan JRA.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Arsip Inaktif yang disimpan oleh Unit Kearsipan:



- a. telah melewati retensi Arsip Inaktif dan berketerangan permanen berdasarkan JRA, Unit Kearsipan melaksanakan penyerahan Arsip kepada ANRI; dan
  - b. telah melewati retensi Arsip Inaktif dan berketerangan musnah berdasarkan JRA, Unit Kearsipan pada tiap Pencipta Arsip dapat melaksanakan Pemusnahan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Arsip Inaktif yang telah diserahkan kepada ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diverifikasi oleh ANRI tetapi tidak termasuk Arsip Statis yang harus diserahkan ke ANRI, Unit Kearsipan selanjutnya memperlakukan Arsip tersebut sebagai Arsip Vital.

#### Pasal 33

Ketentuan mengenai pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 34

- (1) Alih media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan dalam semua bentuk dan media berdasarkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alih media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perekaman, pencatatan, dan pemberkasan Arsip hasil alih media Arsip dapat dilakukan secara komputerisasi dengan pemasangan aplikasi program sistem persuratan dan Kearsipan elektronik.



Pasal 35

- (1) Prasarana dan sarana alih media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
  - c. beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Pemeliharaan dan perlindungan Arsip Elektronik didukung oleh data cadangan dan disimpan pada tempat penyimpanan yang berbeda.
- (3) Media penyimpanan Arsip Elektronik harus memperhatikan kapasitas penyimpanan, ketahanan media, dan kemudahan dalam penggunaannya.

Pasal 36

- (1) Alih media Arsip dapat dilaksanakan oleh Unit Pengolah atau Unit Kearsipan.
- (2) Alih media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi Arsip dan nilai informasi.
- (3) Kondisi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalami kerusakan secara fisik;
  - b. Arsip Elektronik dengan format data versi lama yang perlu diperbarui dengan versi baru; atau
  - c. informasi yang terdapat dalam media lain dimana media tersebut secara sistem tidak diperbarui lagi karena perkembangan teknologi.
- (4) Nilai informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diutamakan untuk dilakukan alih media Arsip, yaitu:
- a. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik harus diumumkan secara serta merta; dan
  - b. Arsip yang berketerangan permanen dalam JRA.

#### Pasal 37

- (1) Unit Pengolah atau Unit Kearsipan dalam melaksanakan alih media Arsip harus membuat berita acara yang disertai dengan daftar Arsip yang dialihmediakan.
- (2) Berita acara alih media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu pelaksanaan;
  - b. tempat pelaksanaan;
  - c. jenis media;
  - d. jumlah Arsip;
  - e. keterangan proses alih media Arsip yang dilakukan;
  - f. pelaksana; dan
  - g. penandatanganan oleh pimpinan Unit Pengolah atau pimpinan Unit Kearsipan.
- (3) Daftar Arsip yang dialihmediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Unit Pengolah;
  - b. nomor urut;
  - c. jenis Arsip;

- d. jumlah Arsip;
- e. kurun waktu; dan
- f. keterangan.

#### Pasal 38

- (1) Arsip yang bernilai guna untuk pembuktian yang telah dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria Arsip yang bernilai guna untuk pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. bukti keberadaan dan/atau perubahan unit kerja;
  - b. bukti dan informasi mengenai kebijakan strategis Kementerian; dan
  - c. bukti dan informasi mengenai kegiatan pokok Kementerian.

#### Pasal 39

- (1) Alih media Arsip diautentikasi oleh pimpinan Unit Pengolah atau pimpinan Unit Kearsipan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Arsip hasil Alih Media.
- (2) Tanda tertentu yang dilekatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
  - a. tanda tangan elektronik;
  - b. kata kunci atau akses;
  - c. tanda air; atau
  - d. metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

#### Pasal 40

Ketentuan mengenai prosedur dan teknis alih media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 41

- (1) Fumigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan langkah kegiatan penyelamatan, pelestarian, perawatan, dan pemeliharaan Arsip yang merupakan sumber informasi penting.
- (2) Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi Arsip agar terbebas dari serangga dan jamur serta hama perusak kertas lainnya sehingga Arsip senantiasa dalam kondisi baik.

Pasal 42

Fumigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Fumigasi dilakukan oleh fumigator yang terlatih dengan baik dan bersertifikat; dan
- b. menggunakan alat dan bahan standar Fumigasi.

Pasal 43

Proses Fumigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. persiapan Fumigasi;
- b. pelaksanaan Fumigasi; dan
- c. pasca Fumigasi.

Pasal 44

- (1) Alat dan bahan Fumigasi terdiri atas alat keselamatan, alat monitoring gas, alat petunjuk bahaya, dan bahan, serta alat aplikasi Fumigasi.
- (2) Selain alat dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fumigasi dapat menggunakan alat dan bahan lain dengan mempertimbangkan kondisi ramah lingkungan, efektif, efisien, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Unit Kearsipan melaksanakan Fumigasi.

Bagian Kelima  
Penyusutan Arsip

Pasal 48

- (1) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Unit Kearsipan dengan melibatkan Unit Pengolah berdasarkan JRA.
- (2) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemindahan Arsip yang telah memasuki retensi sebagai Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
  - b. Pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. penyerahan Arsip Statis oleh pejabat yang berwenang kepada ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media Arsip.
- (2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penyeleksian Arsip Inaktif;
  - b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
  - c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan sesuai dengan prosedur pemindahan Arsip Inaktif.
- (2) Prosedur pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari ANRI.
- (2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Arsip:
  - a. tidak memiliki nilai guna;
  - b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
  - c. tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
  - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- (3) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. pembentukan panitia penilai Arsip;
  - b. penyeleksian Arsip;
  - c. pembuatan daftar Arsip usul musnah oleh Arsiparis di Unit Kearsipan;
  - d. penilaian oleh panitia penilai Arsip;
  - e. permintaan persetujuan usul musnah kepada ANRI melalui Unit Kearsipan;
  - f. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan tertulis atas usul musnah dari ANRI; dan
  - g. pelaksanaan pemusnahan.
- (4) Ketentuan mengenai Prosedur Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 52

- (1) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Unit Kearsipan kepada ANRI.
- (2) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Arsip dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki nilai guna kesejarahan;
  - b. telah habis retensinya; dan/atau
  - c. berketerangan dipermanenkan sesuai dengan JRA Pencipta Arsip.

Pasal 53

- (1) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usul serah oleh Arsiparis di Unit Kearsipan;
  - b. penilaian oleh panitia penilai Arsip terhadap Arsip usul serah;
  - c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada ANRI disertai dengan pernyataan bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan;
  - d. verifikasi dan persetujuan dari ANRI sesuai kewenangannya;
  - e. penetapan Arsip yang akan diserahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada ANRI dengan disertai berita acara dan daftar Arsip yang akan diserahkan.

- (2) Ketentuan mengenai prosedur penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### SUMBER DAYA KEARSIPAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 54

- (1) Sumber daya Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperlukan dalam rangka pengelolaan Arsip di lingkungan Kementerian.
- (2) Sumber daya Kearsipan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. organisasi Kearsipan;
  - b. sumber daya manusia Kearsipan;
  - c. prasarana dan sarana Kearsipan; dan
  - d. pendanaan.

##### Bagian Kedua

##### Organisasi Kearsipan

##### Pasal 55

Organisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Unit Kearsipan I;
- b. Unit Kearsipan II;
- c. Unit Kearsipan III; dan
- d. Unit Pengolah.

##### Pasal 56

- (1) Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyusun kebijakan di bidang Kearsipan;

- b. menerima, mengolah, menyimpan, melakukan penyusutan, melakukan pemeliharaan, dan menyajikan informasi Arsip Inaktif Kementerian;
  - c. melakukan penataan sistem Kearsipan;
  - d. pengembangan teknologi Kearsipan;
  - e. analisis nilai guna atau penilaian Arsip;
  - f. penyelamatan dan Pengamanan Arsip Vital dan Arsip Terjaga;
  - g. melaksanakan usul musnah dari Unit Kearsipan kepada ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan proses inisiasi penetapan usul musnah yang telah mendapat persetujuan ANRI kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang membidangi umum;
  - i. menyerahkan Arsip Statis Kementerian ke ANRI;
  - j. melakukan dan mengoordinasikan pembinaan Kearsipan di lingkungan Kementerian; dan
  - k. melakukan dan mengoordinasikan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Kementerian.
- (2) Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan dan melaksanakan implementasi kebijakan Kearsipan dalam penyelenggaraan Kearsipan di lingkungannya;
  - b. mengelola dan mengendalikan Arsip Aktif;
  - c. mengolah dan menyajikan Arsip menjadi informasi;
  - d. menerima, menyimpan, dan melakukan pemeliharaan Arsip Inaktif sebelum diserahkan kepada Unit Kearsipan I dari Unit Pengolah lingkup unit kerja eselon I yang bersangkutan;
  - e. melakukan kegiatan Penyusutan Arsip dan pengusulan Arsip usul musnah dari Unit Pengolah lingkup unit kerja eselon I yang bersangkutan;



- f. menerima laporan keberadaan Arsip Terjaga dari Unit Pengolah lingkup unit kerja eselon I yang bersangkutan serta melaporkan ke Unit Kearsipan I;
  - g. melaksanakan proses usul musnah dari Unit Pengolah kepada Unit Kearsipan I untuk diteruskan kepada ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melakukan Pemusnahan Arsip yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan I;
  - j. menyerahkan Arsip Statis kepada ANRI melalui Unit Kearsipan I;
  - k. menyerahkan Arsip Terjaga atau salinannya dari Unit Pengolah lingkup unit kerja eselon I yang bersangkutan kepada ANRI melalui Unit Kearsipan I;
  - l. melakukan pembinaan Kearsipan di lingkungannya;
  - m. melakukan dan mengoordinasikan Pengawasan Kearsipan di Unit Pengolah lingkup unit kerja eselon I yang bersangkutan;
  - n. menyusun rencana atau program kerja pengelolaan persuratan dan Kearsipan;
  - o. mengusulkan penetapan panitia penilai Arsip usul musnah kepada pimpinan unit kerja eselon I untuk ditetapkan; dan
  - p. mengusulkan sumber daya manusia pengelola persuratan dan Kearsipan pada masing-masing Unit Pengolah di lingkungan unit kerja eselon I kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia dan aparatur untuk ditetapkan, apabila belum terdapat sumber daya manusia Arsiparis.
- (3) Unit Kearsipan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan dan melaksanakan implementasi kebijakan Kearsipan dalam penyelenggaraan Kearsipan di lingkungannya;
- b. mengelola dan mengendalikan Arsip Aktif;
- c. mengolah dan menyajikan Arsip menjadi informasi;
- d. menerima, menyimpan, dan melakukan pemeliharaan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah lingkup unit pelaksana teknis yang bersangkutan;
- e. melakukan kegiatan Penyusutan Arsip dan pengusulan Arsip usul musnah dari Unit Pengolah lingkup unit pelaksana teknis yang bersangkutan;
- f. menerima laporan keberadaan Arsip Terjaga dari Unit Pengolah lingkup unit pelaksana teknis yang bersangkutan serta melaporkan ke Unit Kearsipan II;
- g. melaksanakan proses usul musnah kepada Unit Kearsipan II untuk diteruskan kepada ANRI melalui Unit Kearsipan I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan Pemusnahan Arsip yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah lingkup unit pelaksana teknis yang bersangkutan ke Unit Kearsipan I melalui Unit Kearsipan II;
- j. menyerahkan Arsip Statis kepada Unit Kearsipan II untuk diteruskan kepada ANRI melalui Unit Kearsipan I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyerahkan Arsip Terjaga atau salinannya dari Unit Pengolah lingkup unit pelaksana teknis yang bersangkutan kepada Unit Kearsipan II untuk diteruskan kepada ANRI melalui Unit Kearsipan I

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. melakukan pembinaan Kearsipan di Unit Pengolah lingkup unit pelaksana teknis yang bersangkutan; dan
  - m. mengusulkan penetapan Arsip usul musnah kepada pimpinan Unit Kearsipan II.
- (4) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d mempunyai tugas:
- a. mengolah dan menyelesaikan naskah dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
  - b. melakukan pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, dan Pengamanan Arsip Aktif; dan
  - c. memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan sesuai kewenangannya.

### Bagian Ketiga

#### Sumber Daya Manusia Kearsipan

##### Pasal 57

Sumber daya manusia Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di bidang Kearsipan;
- b. Arsiparis; dan
- c. pengelola Arsip Aktif atau pelaksana yang ditugaskan mengelola Kearsipan.

##### Pasal 58

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang



mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan manajemen Kearsipan.

- (2) Pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab melakukan perencanaan, penyusunan program, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan kearsipan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan sumber daya Kearsipan.

#### Pasal 59

- (1) Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
  - a. Arsiparis pegawai negeri sipil; dan
  - b. Arsiparis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Arsiparis pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arsiparis pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Arsiparis tingkat terampil; dan
  - b. Arsiparis tingkat ahli,  
sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional Arsiparis.
- (4) Komposisi Arsiparis tingkat terampil dan tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali pengelolaan Arsip di lingkungan Pencipta Arsip.
- (5) Arsiparis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pegawai bukan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang

diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan Kearsipan di lingkungan Pencipta Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kompetensi Arsiparis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus memiliki kompetensi yang sama dengan kompetensi Arsiparis pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 60

- (1) Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (2) Arsiparis menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja di lingkungan Kementerian.
- (3) Fungsi dan tugas Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjaga terciptanya Arsip dari penyelenggaraan kegiatan Kementerian;
  - b. menjaga ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
  - c. menjaga ketersediaan daftar Arsip pada Kementerian;
  - d. menjaga terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menjaga keamanan dan keselamatan Arsip yang berfungsi untuk menjamin Arsip yang berkaitan dengan hak keperdataan melalui pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya;
  - f. menjaga keselamatan dan kelestarian Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;



- g. menjaga keselamatan aset nasional atau Arsip Vital pada Kementerian; dan
  - h. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya.
- (4) Fungsi dan tugas Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Arsiparis mempunyai kewenangan:

- a. menutup penggunaan Arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna Arsip apabila penggunaan Arsip dinilai dapat merusak keamanan informasi dan/atau fisik Arsip;
- b. menutup penggunaan Arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna Arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan penelusuran Arsip pada Unit Pengolah berdasarkan penugasan oleh pimpinan Unit Kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan Arsip.

#### Bagian Keempat

#### Prasarana dan Sarana Kearsipan

#### Pasal 62

- (1) Unit Pengolah dan Unit Kearsipan menyediakan prasarana dan sarana Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c sesuai dengan standar Kearsipan untuk pengelolaan Arsip.
- (2) Prasarana dan sarana Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dapat



dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### Pasal 63

- (1) Prasarana dan sarana Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi gedung, ruangan, dan peralatan yang terdiri atas:
  - a. lokasi, konstruksi, dan tata ruangan gedung;
  - b. lokasi, konstruksi, dan tata ruangan penyimpanan Arsip; dan
  - c. spesifikasi peralatan pengelolaan Arsip.
- (2) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kelima

#### Pendanaan

#### Pasal 64

Seluruh Pencipta Arsip di lingkungan Kementerian wajib mengalokasikan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d dalam rangka penyelenggaraan Kearsipan.

### BAB V

## PENGAWASAN KEARSIPAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 65

Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Pengawasan Kearsipan eksternal; dan
- b. Pengawasan Kearsipan internal.

Bagian Kedua  
Pengawasan Kearsipan Eksternal

Pasal 66

Pengawasan Kearsipan eksternal sebagaimana dalam Pasal 65 huruf a dilaksanakan oleh ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengawasan Kearsipan Internal

Pasal 67

- (1) Pengawasan Kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan oleh Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II.
- (2) Pengawasan Kearsipan internal oleh Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Unit Kearsipan II; dan/atau
  - b. seluruh Unit Pengolah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Pengawasan Kearsipan internal oleh Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Unit Kearsipan III; dan/atau
  - b. Unit Pengolah di Unit Kearsipan III.
- (4) Unit Kearsipan II dalam melakukan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dan/atau berkoordinasi dengan Unit Kearsipan I.

Pasal 68

Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan terhadap:

- a. sistem Kearsipan internal; dan
- b. pengelolaan Arsip Aktif.

Pasal 69

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem Kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:

- a. pengelolaan Arsip; dan
- b. sumber daya Kearsipan.

Pasal 70

- (1) Pengawasan pengelolaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilaksanakan setelah kegiatan pengawasan sistem Kearsipan internal selesai dilakukan.
- (2) Pengawasan pengelolaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek penilaian yang meliputi pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif.

Pasal 71

- (1) Dalam hal keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan internal, jumlah Unit Kearsipan dan Unit Pengolah yang dilakukan pengawasan ditentukan berdasarkan metode penetapan sampel.
- (2) Metode penetapan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan sampel secara berimbang dan merata.
- (3) Ketentuan mengenai metode penetapan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Hasil Pengawasan Kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus dilaporkan kepada ANRI paling lama pada akhir bulan Agustus setiap tahunnya.



- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ANRI melaksanakan verifikasi terhadap hasil Pengawasan Kearsipan internal yang dilakukan oleh Kementerian.
- (3) Perolehan nilai dari hasil Pengawasan Kearsipan internal yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai nilai Pengawasan Kearsipan internal oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Penetapan nilai Pengawasan Kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Keempat Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

##### Pasal 73

- (1) Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan nilai Pengawasan Kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Nilai Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60% (enam puluh persen); dan
  - b. nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Nilai hasil Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam menentukan Indeks kinerja penyelenggaraan Kearsipan pada objek pengawasan.
- (4) Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. nilai > 90–100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan);

- b. nilai > 80-90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan);
- c. nilai > 70-80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik);
- d. nilai > 60-70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik);
- e. nilai > 50-60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup);
- f. nilai > 30-50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan
- g. nilai 0-30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).

#### Bagian Kelima

#### Tim Pengawas Kearsipan

#### Pasal 74

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 dibentuk tim pengawas Kearsipan internal Kementerian.
- (2) Tim pengawas Kearsipan internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan seluruh Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II di lingkungan Kementerian.
- (3) Tim pengawas Kearsipan internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 75

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan internal, tim pengawas Kearsipan internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 harus memiliki kompetensi Pengawasan Kearsipan.

- (2) Untuk memenuhi kompetensi Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas Kearsipan internal Kementerian harus mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan Pengawasan Kearsipan.
- (3) Bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. ANRI; dan/atau
  - b. Unit Kearsipan I dengan bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan ANRI.
- (4) Dalam pembentukan tim pengawas Kearsipan internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperhitungkan jumlah objek pengawasan, alokasi waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia.

#### Pasal 76

- (1) Unit Kearsipan I sesuai dengan kewenangannya sebagai Pembina Kearsipan melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan.
- (2) Unit Kearsipan II dapat melakukan pemantauan terhadap Unit Pengolah di lingkungannya dengan melibatkan tim pengawas Kearsipan internal Kementerian dan melaporkan kepada Unit Kearsipan I sebagai Pembina Kearsipan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan status tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan pada objek pengawasan.
- (4) Kegiatan pemantauan dilaksanakan setelah dilakukan kegiatan Audit Kearsipan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan menggunakan instrumen monitoring Kearsipan.



- (6) Ketentuan mengenai Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan instrumen pemantauan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Dalam rangka penyusunan laporan hasil Pengawasan Kearsipan internal, tim pengawas Kearsipan internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 menyusun LAKI terhadap setiap objek pengawasan.
- (2) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipan serta disampaikan kepada setiap objek pengawasan.

#### Pasal 78

- (1) Selain menyusun LAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, tim pengawas Kearsipan internal Kementerian menyusun LAKI konsolidasi.
- (2) LAKI konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan hasil Pengawasan Kearsipan pada seluruh objek pengawasan.
- (3) LAKI konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipan.
- (4) LAKI konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kepala ANRI setiap tanggal 31 Agustus setiap tahun anggaran sebagai bahan penyusunan laporan hasil Pengawasan Kearsipan nasional.

### BAB VI

#### PEMBINAAN KEARSIPAN

#### Pasal 79

- (1) Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e di lingkungan Kementerian dilakukan agar sistem pengelolaan Kearsipan pada masing-

masing pencipta Arsip di lingkungan Kementerian dapat terselenggara dengan baik.

- (2) Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kearsipan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. koordinasi penyelenggaraan Kearsipan;
  - b. penyusunan pedoman dan standar Kearsipan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan;
  - d. sosialisasi Kearsipan;
  - e. Pengawasan Kearsipan;
  - f. pendidikan dan pelatihan Kearsipan; dan
  - g. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Kearsipan.

#### Pasal 80

- (1) Unit Kearsipan I bersama unit kerja yang membidangi sumber daya manusia dan aparatur, melakukan penilaian terhadap hasil kerja Arsiparis di lingkungan Kementerian.
- (2) Unit Kearsipan I memberikan usulan rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia dan aparatur dan unit kerja yang membidangi Pendidikan dan pelatihan pada Kementerian.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 81

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 766

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

I. PEMELIHARAAN ARSIP AKTIF

A. Pemberkasan Arsip Aktif

Pemberkasan Arsip dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, meliputi:

1. Arsip Kertas

Langkah pemberkasan meliputi:

a. pemeriksaan Berkas

Pemeriksaan Berkas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu Berkas surat telah siap untuk disimpan. Terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan Berkas surat yaitu:

1) Pemeriksaan tanda perintah file atau simpan

Tanda perintah file atau simpan diberikan oleh pimpinan unit kerja terhadap Berkas surat yang telah selesai diproses dan perlu untuk disimpan. Pada lembar disposisi biasanya ditulis “file” atau “simpan” yang berarti bahwa surat tersebut sudah layak dan siap untuk disimpan.

2) Pemeriksaan kelengkapan Berkas surat

Setelah dilakukan pemeriksaan Berkas surat dan dipastikan bahwa Berkas surat tersebut siap untuk disimpan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Berkas surat berupa lampiran-lampiran yang menjadi kelengkapan sesuai yang tercantum pada surat tersebut. Dalam memeriksa kelengkapan Berkas surat perlu memilah

dan memisahkan sehingga apabila terdapat duplikasi lampiran yang berlebihan langsung dihancurkan.

b. pengelompokan Berkas Arsip dalam folder

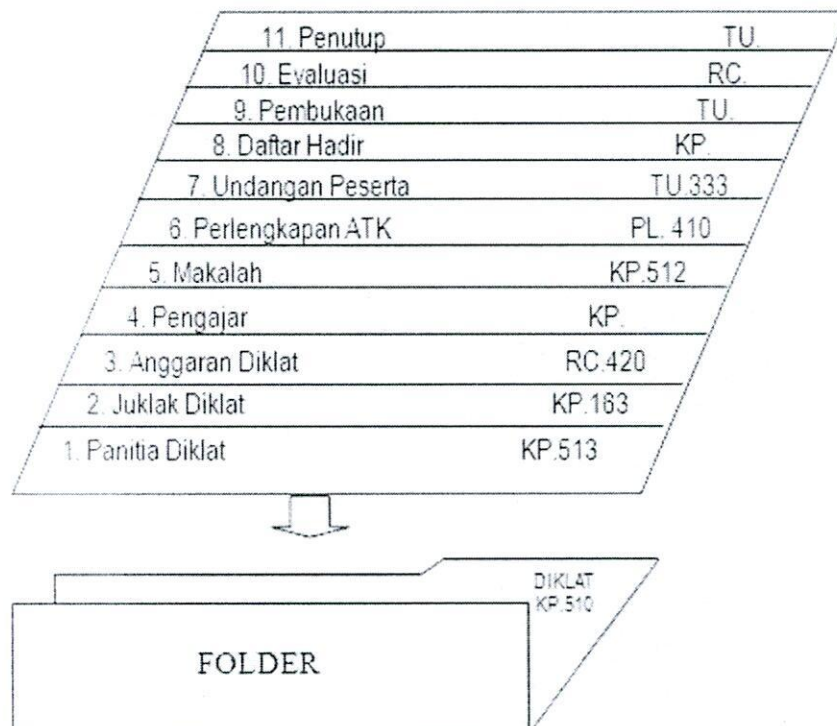
Langkah pengelompokan Arsip dalam folder sebagai berikut:

1) pengelompokan Arsip menurut bentuk Dosier

Dosier merupakan Berkas Arsip yang di tata atas dasar kesamaan masalah atau kegiatan. Pengelompokan ini dilakukan dengan pengelompokan Arsip yang saling berkaitan dalam satu kegiatan pekerjaan. Penyusunan Arsip diurutkan atas dasar kronologis, yaitu tanggal Arsip menurut proses kegiatan.

Contoh

pengelompokan Arsip menurut bentuk Dosier sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.



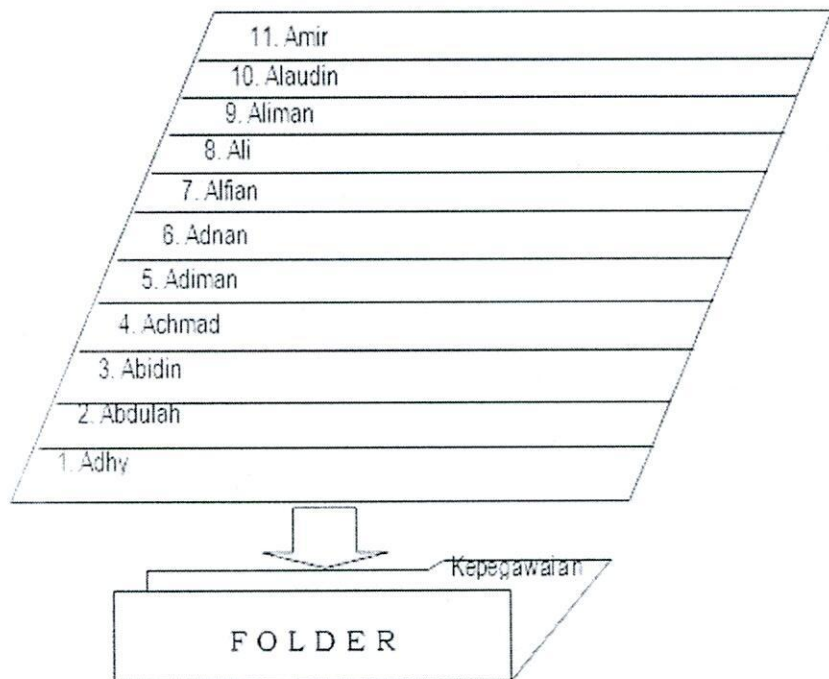
Gambar 1. Pengelompokan Arsip bentuk Dosier

2) pengelompokan Arsip menurut bentuk Rubik

Pengelompokan ini penyusunannya diurutkan atas dasar Indeks dokumen yaitu apabila Indeks dokumen berupa kata/huruf susunan Arsip diatur menurut abjad Indeks dan apabila Indeks dokumen berupa angka (nomor) susunan Arsip diatur menurut urutan angka.

Contoh

pengelompokan Arsip menurut bentuk Rubik sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.



Gambar 2. pengelompokan Arsip bentuk Rubik

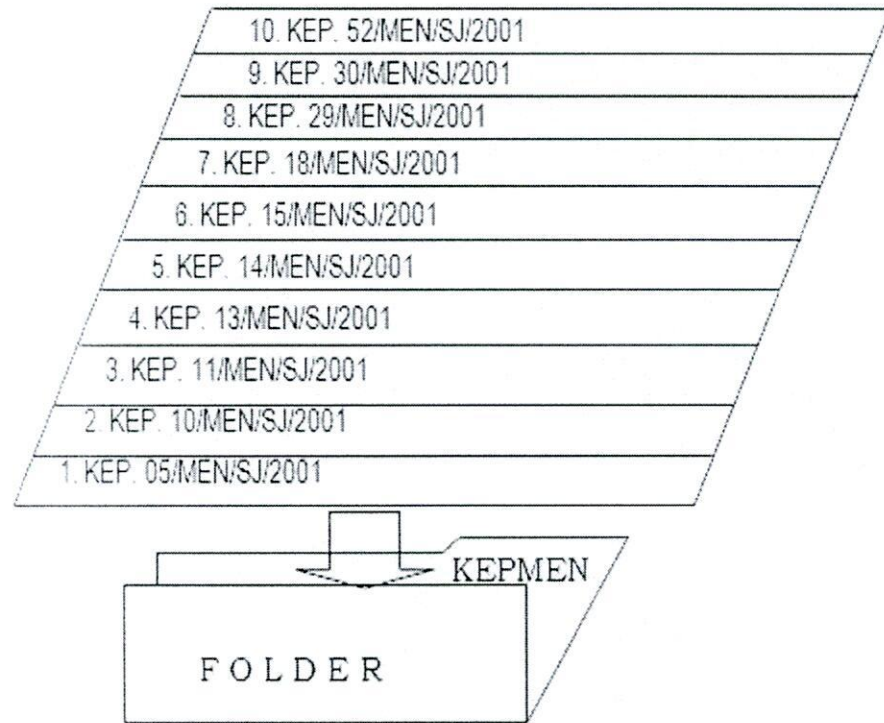
3) pengelompokan Arsip menurut bentuk Seri

Seri merupakan Berkas Arsip yang di tata atas dasar kesamaan jenis. Pengelompokan Arsip dilakukan berdasarkan Arsip yang jenisnya sama, disusun berdasarkan kesamaan jenis

Contoh

pengelompokan Arsip menurut bentuk Seri sebagaimana tercantum dalam Gambar 3.





Gambar 3. pengelompokan Arsip bentuk Seri

c. penentuan Indeks

Indeks sebagai sarana untuk penemuan kembali Arsip apabila diperlukan dengan cara melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan Arsip tersebut dengan yang lainnya. Menentukan Indeks khususnya Indeks subyek, harus dibuat dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

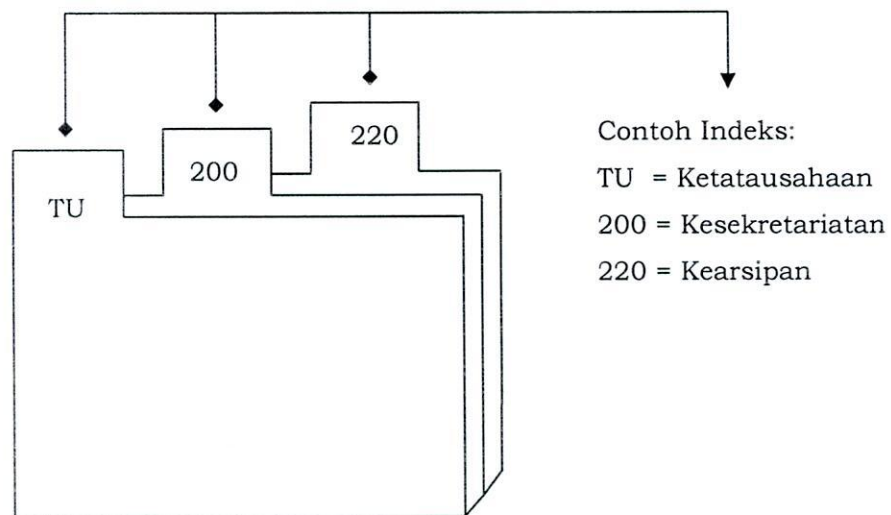
- 1) singkat, jelas, dan mudah diingat;
- 2) berupa kata benda atau kata yang member pengertian kebendaan;
- 3) penentuan berorientasi pada kebutuhan pemakai; dan
- 4) harus dapat dikelompokkan dalam pola klasifikasi sehingga diketahui tempat penyimpanannya.

Penentuan Indeks dalam sistem penyimpanan Arsip berdasarkan permasalahan tidak semudah penentuan Indeks dalam sistem penyimpanan Arsip yang lain. Sebelum menentukan Indeks petugas Kearsipan harus memahami secara cermat isi informasi yang terkandung dalam Berkas surat yang akan disimpan.

Ketidaktercemerutan dalam memahami isi informasi Berkas surat dapat berpengaruh terhadap ketidaktepatan memahami hubungan Berkas dengan suatu subyek, sehingga dapat mengakibatkan kekeliruan dalam memilih subyek yang cocok pada daftar subyek atau klasifikasi.

Apabila isi informasi yang terkandung dalam Berkas surat terdiri dari satu subyek, penentuan indeksnya berdasarkan pada subyek yang paling berkepentingan dalam menentukan tempat Berkas disimpan, dan subyek yang lain harus dibuat Tunjuk Silang.

Contoh penulisan Indeks sebagaimana tercantum dalam Gambar 4.



Gambar 4. Penulisan Indeks

d. pengkodean

Pengkodean terhadap subyek utama dan sub subyek diberi garis bawah atau dilakukan pemberian tanda pada kata yang diseleksi dari yang tertera pada Berkas surat. Jika judul subyek tidak disebutkan, maka pemberian tanda ditulis pada sebelah atas Berkas surat. Jika menggunakan kode *alpa numeric* sesuai yang ditentukan dalam Pola Klasifikasi, kode tersebut ditulis pada atas atau sudut kanan Berkas. Apabila ditemukan lebih dari satu subyek, maka hanya subyek yang paling penting diberi kode, sedangkan subyek yang lain diberi

tanda tertentu untuk dibuat Tunjuk Silang. Dalam menentukan sub subyek suatu Berkas yang akan disimpan, petugas/Arsiparis sebaiknya tidak berdasarkan ingatan, tetapi juga perlu mengecek daftar subyek/klasifikasi secara rutin untuk menjamin penentuan judul subyek atau pengkodean secara benar.

e. Tunjuk Silang

Tunjuk Silang dipergunakan untuk melengkapi Indeks dalam menampung penamaan dan peristilahan lain yang mempunyai arti yang sama, serta mempertemukan beberapa informasi yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Dengan demikian Tunjuk Silang diperlukan apabila ditemukan informasi yang terkandung dalam suatu Berkas surat lebih dari satu subyek atau sub subyek atau memiliki lebih dari satu peristilahan dan mempunyai arti yang sama.

Contoh

Tunjuk Silang sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. dan Tabel 2.

Tabel 1.

Tujuk Silang untuk mempertemukan beberapa subyek yang berbeda tetapi saling berhubungan

Indeks: Biaya Kursus Komputer	Kode:KU.240	Tanggal: Nomor:
Lihat:		
Indeks: Kursus Komputer	Kode:KP.510	Tanggal: Nomor:



Tabel 2.

Tunjuk Silang untuk menampung peristilahan yang mempunyai arti sama

Indeks: Kursus Komputer	Kode:KU.240	Tanggal: Nomor:
Lihat:		
Indeks: Biaya Kursus Komputer	Kode:KP.510	Tanggal: Nomor:

f. penyortiran

Penyortiran Berkas Arsip dilakukan berdasarkan subye kutama, sub subyek serta rinciannya atau melalui kode-kode yang ditetapkan dalam Pola Klasifikasi. Kegiatan ini dilakukan pada saat Berkas surat dimasukkan dalam folder untuk memudahkan labelisasi dan penataan Berkas di tempat penyimpanan.

g. penyimpanan Berkas

Penyimpanan Berkas perlu memperhatikan peralatan yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan. Pada umumnya peralatan-peralatan untuk penyimpanan Berkas terdiri dari *filing cabinet*, *guide/sekat*, boks Arsip, dan folder.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan Berkas, meliputi:

- 1) bentuk Berkas harus *self indexing* yang berarti susunan Berkas tertata sedemikian rupa sehingga Berkas akan dapat menunjukkan apa dan dimana Berkas itu tersimpan;
- 2) Indeks Berkas berdasarkan sistem angka, urutan abjad, sistem masalah, sesuai dengan tujuan, kegunaan, dan bentuk Arsip; dan
- 3) klasifikasi Berkas berdasarkan masalah antara lain:
  - a) surat menyurat;
  - b) hasil penelitian; dan
  - c) penyelidikan kasus.

- h. memasukkan Arsip dalam folder.
- 1) Arsip yang telah ditentukan kode dan indeksinya dimasukkan dalam folder, pada tab folder dituliskan Kode Klasifikasi dan indeksinya.
  - 2) Arsip yang merupakan rangkaian Berkas yang terdahulu disatukan dengan kode yang bersangkutan, tidak perlu dibuat folder baru.
  - 3) menentukan folder pada susunan sekat dengan cara:
    - a) Arsip yang belum dibuat sekat sebagai tanda pemisah antara masalah satu dengan yang lainnya, perlu dibuatkan sekat;
    - b) Arsip yang sudah memiliki sekat tidak perlu dibuatkan sekatnya dan langsung menempatkan folder tersebut dibagian sekat selanjutnya;
    - c) tata cara penyusunan folder dengan judul nama masalah, orang, wilayah, dan lain-lainnya diatur menurut abjad;
    - d) menetapkan jangka simpan pada folder sesuai dengan JRA; dan
    - e) folder yang berisi Berkas dan telah diberi tanda pengenal (Indeks) ditata atau dimasukkan dibelakang *guide/seka* dalam *filig cabinet* sesuai dengan klasifikasi subyek dan rinciannya.

## 2. Arsip Elektronik

Arsip Elektronik yaitu Arsip yang diciptakan (dibuat, diterima, dan/atau disimpan) dalam format elektronik. Dibandingkan dengan Arsip konvensional (kertas), Arsip Elektronik memiliki beberapa keuntungan, meliputi:

- a. proses penemuan dan penyajian informasi yang cepat dan lengkap;
- b. akses dan penggunaan informasi oleh lebih dari satu pengguna (*multiuser*) dalam waktu yang bersamaan;
- c. penyimpanan informasi lebih terpusat; dan

- d. memiliki keakuratan dalam penyimpanan yang tinggi.

Jenis Arsip Elektronik yang dikelola dilingkungan Kementerian Perdagangan, meliputi:

- a. Arsip hasil alih media melalui proses *scanning*;
- b. Arsip audio;
- c. Arsip audio visual;
- d. Arsip foto; dan
- d. Arsip citra digital.

Penerapan sistem pemberkasan Arsip Elektronik dilakukan menggunakan sistem informasi. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemberkasan pada Arsip bentuk kertas, tetapi yang menjadi perbedaan mendasar adalah pemberkasan Arsip dapat secara langsung dilakukan ketika proses input data berlangsung.

Langkah pemberkasan Arsip Elektronik dilakukan sebagai berikut:

- a. Input Data

Proses input data dilakukan dengan memasukkan informasi yang terdapat di dalam Arsip, berupa nomor, perihal, jumlah lampiran, jenis Arsip, hasil *scanning*, lokasi penyimpanan fisik Arsip, jangka waktu penyimpanan, dan kata tangkap Arsip. Dalam proses input data, yang harus di hindari adalah penggunaan kata singkatan yang tidak umum, kesalahan pengetikan, dan penulisan kalimat yang tidak lengkap. Hal ini akan mengakibatkan sulitnya penemuan kembali Arsip.

- b. Pengelompokan Arsip

Pengelompokan Arsip Elektronik dilakukan pada saat proses input data berlangsung dengan memperhatikan jenis dan media Arsipnya. Pengelompokan secara elektronik dapat dilakukan secara otomatis pada waktu proses input data berlangsung, Arsip dengan sendirinya akan mengelompok dan tentunya hal ini akan



meningkatkan efisiensi waktu dan efektifitas proses pencariannya.

c. Sistem penyimpanan dan temu balik Arsip Elektronik

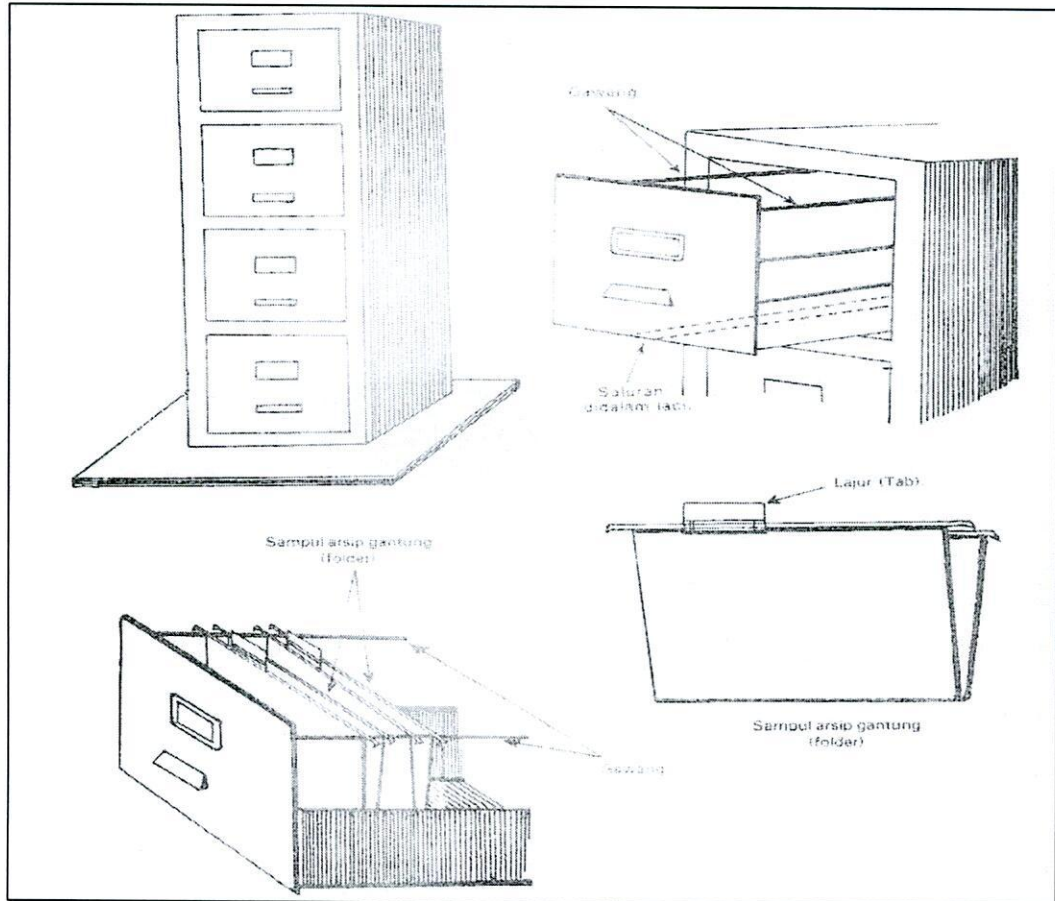
Proses data penyimpanan secara sederhana adalah data disimpan dengan didasarkan pada aplikasi dan jenis informasi. Suatu *file* data bisa terdiri dari satu Arsip atau lebih. Penyimpanan *file* diatur dalam direktori yang diciptakan dan diolah oleh sistem operasi. Direktori dapat mempunyai fungsi sebagai daftar isi untuk media yang bersangkutan. Hal yang penting didalam pengelolaan Arsip Elektronik adalah pemberian label nama. Format pelabelan nama yang standar sebaiknya dilakukan pada direktori atau nama *file* dan media penyimpanan. Pemberian label nama baik yang bersifat eksternal maupun internal secara standar, terpadu, dan konsisten akan memudahkan penemuan kembali informasi. *Guide indeks* yang sesuai memungkinkan pengguna untuk mengatur sistem pengindeksan sehingga memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali fisik disket.

d. Pemeliharaan dan Perlindungan Arsip Elektronik

Informasi yang terdapat dalam Arsip Elektronik dapat dengan mudah diubah, dimodifikasi, dihapus baik secara sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh *brainware* (manusia) atau dirusak oleh suatu sebab seperti virus yang merusak *boot sector* atau *file*. Hal yang dilakukan dalam pemeliharaan dan perlindungan Arsip Elektronik adalah melalui proses *back up* dan disimpan pada tempat penyimpanan yang berbeda namun mudah ditemukan bila diperlukan. Selain itu media penyimpanannya harus diperhatikan seperti kapasitas penyimpanan, ketahanan media, dan mudah penggunaannya.

B. Penyimpanan Arsip Aktif

1. Penyimpanan Arsip Aktif ke *filing cabinet* sebagai berikut:



2. Alur proses pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif di Unit Pengolah

a. membuat perencanaan pemberkasan yang meliputi:

- 1) identifikasi Arsip-Arsip yang akan tercipta dari pelaksanaan kegiatan unit kerja selama 6 (enam) bulan yang dituangkan kedalam daftar identifikasi Arsip yang akan tercipta.
- 2) mempersiapkan peralatan pemberkasan yaitu:
  - a) menyiapkan folder yang akan digunakan untuk penempatan Arsip yang diberkaskan.
  - b) menyiapkan sekat (*guide*) yang terdiri dari seka primer, sekat sekunder, dan sekat tersier.
  - c) menyiapkan pelabelan sekat, memberikan identitas pada sekat sesuai Klasifikasi Arsip yaitu masalah pada sekat primer, sub masalah pada sekat sekunder, dan sub-sub masalah pada sekat tersier.



- d) menyiapkan *filig cabinet*, menyiapkan *filig cabinet* yang akan menjadi tempat penyimpanan Arsip. Di dalam *filig cabinet* ditempatkan sekat primer, sekat sekunder, dan tersier secara berurutan.
  - e) menyiapkan formulir tunjuk silang.  
Tunjuk silang digunakan jika Berkas Arsip berkaitan dengan Berkas Arsip yang lain namun berbeda tempat penyimpanan karena berbeda fisik Arsipnya dan tidak bisa disatukan karena ada perbedaan istilah yang mempunyai subyek sama.
  - f) menyiapkan formulir *out indicator*, sebagai alat penanda ketika ada Arsip yang sedang digunakan dari *filig cabinet*.
- b. melakukan pemberkasan Arsip Aktif, dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menerima dokumen/Arsip dan membaca tanda perintah "*file*" atau "simpan" yang diberikan oleh pejabat eselon II dan/atau eselon III;
  - 2) memeriksa ketepatan substansi berdasar pada hal atau masalah Arsip yang akan diberkaskan serta memeriksa kelengkapan Arsip;
  - 3) meregistrasi Arsip kedalam format yang sesuai dengan daftar Arsip Aktif;
  - 4) menyortir dan memisahkan jika terdapat non Arsip dan duplikasi yang berlebihan;
  - 5) memasukan Arsip kedalam folder dan disusun secara berurut sesuai kronologis waktu, dimulai dengan Arsip tertua berada paling belakang;
  - 6) menuliskan judul Berkas (Indeks) yang berisi kata tangkap dan Kode Klasifikasi berkas pada kertas label dan melekatkannya pada tab folder;
  - 7) membuat dan mengisi formulir Tunjuk Silang apabila diperlukan;



- 8) membuat daftar Arsip Aktif yang meliputi daftar Berkas dan daftar isi Berkas;
  - 9) memastikan kelengkapan Berkas Arsip sesuai dengan daftar identifikasi Arsip yang akan tercipta;
  - 10) menyempurnakan daftar Arsip Aktif dan melakukan pembaruan data jika terdapat penambahan Arsip.
- c. menata Berkas Arsip dan menyimpannya kedalam *filing cabinet*
- Sesuai dengan daftar Arsip Aktif, dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menata sekat pada *filing cabinet* secara berurutan dimulai dari sekat primer, sekat sekunder, dan sekat tersier;
  - 2) menyimpan Berkas Arsip ke dalam *filing cabinet* dan menempatkannya di belakang sekat sesuai dengan Klasifikasi Arsip yang dicantumkan pada tabel folder;
  - 3) memberikan persetujuan rancangan daftar Arsip Aktif yang meliputi daftar Berkas dan daftar isi Berkas;
  - 4) menyampaikan daftar Arsip Aktif secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Unit Kearsipan;
  - 5) membuat formulir peminjaman Arsip sebagai sarana peminjaman Arsip di sentral Arsip Aktif; dan
  - 6) memastikan keutuhan Arsip yang disimpan secara berkala sesuai dengan daftar Arsip Aktif.
- d. memberikan persetujuan rancangan daftar Arsip Aktif yang meliputi daftar Berkas dan daftar isi Berkas;
- e. menyampaikan daftar Arsip Aktif secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Unit Kearsipan;
- f. membuat formulir peminjaman Arsip sebagai sarana peminjaman Arsip di sentral Arsip Aktif; dan
- g. memastikan keutuhan Arsip yang disimpan secara berkala sesuai dengan daftar Arsip Aktif.

### C. Pelayanan Berkas

Pelayanan Berkas merupakan kegiatan penemuan kembali Berkas dan proses administrasi peminjaman dan pengembalian Berkas Arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah yang perlu dilakukan dalam layanan Berkas meliputi:

#### 1. Penemuan Kembali Berkas Arsip

Penemuan kembali Berkas biasanya dilakukan atas dasar permintaan dari pihak pengguna, yaitu pejabat atau unit kerja. Permintaan Berkas akan menyebutkan unsur-unsur keterangan Berkas surat yang diinginkan, antara lain Indeks Berkas, subyek, tanggal, dan nomor surat, kode, dan lainnya atau hanya sebagian dari unsur keterangan tersebut. Dilokasi penyimpanan (seperti *filig cabinet*) akan terlihat judul subyek dan kode sebagaimana ditetapkan dalam Pola Klasifikasi Arsip pada *tab guide* dan *tab folder* sebagai tanda pengenal himpunan Berkas, sehingga dapat diketahui dan ditemukan keterangan sesuai yang diinginkan tersebut.

#### 2. Pengendalian Berkas Arsip

Setelah ditemukan Berkas yang diinginkan kemudian dilakukan pengambilan Berkas di tempat penyimpanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan pengendalian. Pengambilan dan pengendalian Berkas dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *out folder*, *outguide*, *outsheet*, formulir pinjam Berkas, dan *tickler file*:

- a) *out folder*/folder keluar, digunakan sebagai pengganti Berkas yang terdapat dalam folder yang diambil untuk peminjaman Berkas;
- b) *outguide*/sekat keluar, digunakan sebagai pengganti Berkas yang disimpan dalam beberapa folder yang diambil untuk peminjaman Berkas;
- c) *outsheet*/lembaran keluar, digunakan untuk mencatat Berkas yang diambil atau dipinjam baik dalam satu folder ataupun beberapa folder;
- d) formulir pinjam Berkas, digunakan untuk pengendalian Berkas yang dipinjam; dan



e) *tickler file*, digunakan untuk menempatkan formulir pinjam Berkas agar dapat diketahui Berkas yang dipinjam dan tanggal pengembaliannya.

3. Pengontrolan Berkas Arsip

Pengontrolan dilakukan untuk mengetahui dan mengamankan keberadaan Berkas yang dipinjam. Untuk mengetahui keberadaan Berkas yang dipinjam perlu dilakukan pengecekan terhadap sarana pengendalian. Formulir pinjam Berkas yang disimpan pada *tickler file* dapat menunjukkan Berkas apa saja yang dipinjam dan kapan Berkas tersebut harus dikembalikan. Apabila terdapat Berkas yang batas tanggal pengembaliannya sudah selesai dan belum dikembalikan perlu dilakukan pengecekan kepada pejabat/unit kerja peminjam untuk dikonfirmasi lebih lanjut dan segera mengembalikannya. Untuk Berkas yang selesai dipinjam dan dikembalikan dilakukan pengecekan sesuai dengan catatan peminjaman. Pengembalian Berkas sesuai dengan lokasi atau tempat penyimpanan semula diikuti penarikan sarana pengambilan dan pengendalian Berkas.

## II. PROGRAM ARSIP VITAL

### A. Umum

1. Pimpinan Pencipta Arsip wajib menunjuk Arsiparis atau petugas pengelola Arsip Vital melalui surat tugas.
2. Dalam hal perlindungan dan pengamanan, pemulihan Arsip Vital dilaksanakan oleh masing-masing pengelola Arsip Vital yang berada di *central file* pada Unit Pengolah bekerja sama dengan Unit Kearsipan.
3. Program Arsip Vital di lingkungan Kementerian dilaksanakan secara berkesinambungan antara Unit Pengolah (selaku pengelola *central file* di lingkungan unit kerjanya) dan Unit Kearsipan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. *central file* di Unit Pengolah setiap Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, atau Badan bertugas mengelola Arsip Vital dari bagian atau bidang di lingkungannya;



- b. *central file* di lingkungan Unit Pengolah pada unit pelaksana teknis setara eselon III mengelola Arsip Vital dari bagian atau bidang di lingkungannya; dan
- c. *central file* di lingkungan Unit Pengolah pada unit pelaksana teknis setara eselon IV mengelola Arsip Vital dari subbagian atau sub bidang di lingkungannya.

B. Sumber Daya Manusia Pengelola Arsip Vital

Sumber daya manusia Kearsipan pengelola Arsip Vital di lingkungan Kementerian yaitu Arsiparis atau pengelola Arsip yang diberi kewenangan untuk mengelola *central file* dan mengelola Arsip Vital di Unit Pengolah dimana Arsiparis atau pengelola Arsip tersebut ditempatkan. Sumber Daya Manusia pengelola Arsip Vital selain mengelola Arsip Vital juga wajib melaporkan setiap adanya penambahan ataupun pengurangan Berkas Arsip Vital yang ada di Unit Pengolah kepada Unit Kearsipan dengan melampirkan daftar Arsip Vital yang dikelola.

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan Program Arsip Vital terdiri atas:

1. Ruang Penyimpanan

Ruang penyimpanan Arsip Vital di setiap Unit Pengolah dan Unit Kearsipan menyatu dengan ruang *central file*.

2. *Filing Cabinet*

*Filing cabinet* adalah sarana untuk menyimpan Arsip Vital, memiliki karakteristik tidak mudah terbakar (memiliki daya tahan paling sedikit 4 jam kebakaran), kedap air, dan dapat dikunci.

3. *Horizontal Cabinet*

*Horizontal cabinet* adalah sarana untuk menyimpan Arsip Vital berbentuk peta atau rancang bangun, memiliki karakteristik tidak mudah terbakar (memiliki daya tahan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam kebakaran), kedap air, dan dapat dikunci.



Keterangan:

- a. Nomor : (diisi dengan nomor urut Arsip Vital).
- b. Jenis Arsip : (diisi dengan jenis Arsip Vital yang telah di data).
- c. Tingkat perkembangan : (diisi dengan tingkat perkembangan Arsip Vital)
- d. Kurun waktu : (diisi dengan tahun Arsip Vital tercipta)
- e. Media : (diisi dengan jenis media rekam Arsip Vital)
- f. Jumlah : (diisi dengan banyaknya Arsip Vital missal 1 (satu) Berkas)
- g. Jangka simpan : (diisi dengan batas waktu sebagai Arsip Vital)
- h. Lokasi simpan : (diisi dengan tempat Arsip Vital tersebut)
- i. Metode pelindungan : (diisi dengan jenis metode pelindungan sesuai dengan kebutuhan media rekam yang digunakan)
- j. Keterangan : (diisi dengan informasi spesifik yang belum/tidak ada dalam kolom yang tersedia)

9. *Out Indicator*

*Out Indicator* adalah alat yang digunakan untuk menandai adanya Arsip yang keluar dari tatanan penyimpanan *filig cabinet* dalam bentuk formulir.

CONTOH  
*OUT INDICATOR*

NO	NAMA	JENIS	KODE	TGL	PARAF	TGL	PARAF
a	b	C	d	e	F	g	h

Keterangan:

- a. Nomor : (diisi dengan nomor urut Arsip Vital yang keluar dari tatanan penyimpanan)
- b. Nama peminjam : (diisi dengan nama peminjam Arsip Vital)
- c. Jenis Arsip : (diisi dengan jenis Arsip Vital yang dipinjam)
- d. Kode Arsip : (diisi dengan kode Arsip Vital)



- e. Tanggal pinjam : (diisi dengan tanggal peminjaman Arsip Vital)
- f. Paraf peminjam : (diisi dengan paraf peminjam)
- g. Tanggal kembali : (diisi dengan batas waktu peminjaman ArsipVital)
- h. Paraf kembali : (diisi dengan paraf pengembalian)

10. Indeks

Penentuan Indeks atau kata tangkap dapat berupa: subyek, nama tempat atau lokasi, atau identitas lainnya.

11. Tunjuk Silang

Tunjuk Silang digunakan apabila:

- a. terjadi perubahan nama orang atau pegawai;
- b. Berkas Arsip Vital memiliki lampiran tetapi berbeda media sehingga penyimpanannya berbeda; dan
- c. memiliki keterkaitan dengan Berkas lain.

CONTOH FORMULIR TUNJUK SILANG

Indeks:	Kode:	Tanggal: 21 Agustus 2018 No: HM.02.01/II/2018
Lihat: Ruang Central FileGMB I Lantai GF, Rak 2 baris 2 kolom 1		
Indeks: Arsip Foto Kunjungan Presiden Prancis		Tanggal: 21 Agustus 2018 No: HM.02.01/II/2018

D. Prosedur Pengelolaan

Prosedur pengelolaan Arsip Vital bertujuan untuk memandu pengelola Arsip Vital yang berada di *central file* Unit Pengolah. Kegiatan pengelolaan Arsip Vital dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis-jenis Arsip Vital yang ada di unit kerja masing-masing, berdasarkan Daftar Arsip Vital.

## 2. Penataan Arsip Vital

Penataan Arsip Vital dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

### a. pemeriksaan

melakukan pemeriksaan kelengkapan Berkas Arsip Vital yang akan ditata, Berkas Arsip yang lengkap harus menggambarkan proses kegiatan dari awal sampai akhir dan kondisi fisik Berkas.

### b. menentukan Indeks Berkas

menentukan kata tangkap, berupa nomor, nama lokasi, masalah atau subyek.

Contoh Indeks:

Sertifikat Tanah Gedung Mina Bahari III

### c. menggunakan Tunjuk Silang

apabila ada Berkas yang memiliki keterkaitan dengan Berkas yang memiliki jenis media yang berbeda.

Contoh:

rencana bangun Gedung Utama Kemendag dengan Berkas perencanaan pembangunan Gedung Utama Kemendag.

### d. Pelabelan

memberikan label pada sarana penyimpanan Arsip:

- 1) Arsip yang disimpan pada *pocket file*, label dicantumkan pada bagian depan *pocket file*.
- 2) Arsip peta atau rancang bangun.
- 3) Arsip yang menggunakan media magnetik label dicantumkan pada:
  - a) untuk Arsip foto, *negative* foto ditempel pada lajur atas plastik transparan, *positive* foto ditempel pada bagian belakang foto dan amplop atau pembungkus;
  - b) untuk *slide* ditempelkan pada *frame*;
  - c) video dan film ditempelkan pada bagian luar dan lapisan transparan (seperti *negative* foto) dan pada wadahnya; dan
  - d) untuk kaset dan/atau Cakram Digital (CD) ditempelkan pada kaset dan/atau CD dan wadahnya.

- e. Penempatan Arsip  
kegiatan penempatan Arsip pada sarana penyimpanan sesuai dengan jenis media Arsip.
3. Menyusun Daftar Arsip Vital yang ada di Unit Pengolah  
Penyusunan daftar Arsip Vital berisi informasi tentang Arsip Vital unit kerja ke dalam bentuk formulir.
- E. Pelindungan dan Pengamanan Arsip Vital
1. Metode pelindungan Arsip Vital yang dapat dilakukan meliputi:
    - a. duplikasi  
duplikasi Arsip Vital Kementerian dilakukan dengan metode digitalisasi khususnya terhadap Arsip aset dan produk hukum. Untuk Arsip Vital selain Arsip aset dan produk hukum, metode duplikasi yang dilakukan dengan menciptakan salinan atau digitalisasi. Penentuan kriteria Arsip Vital yang perlu dilakukan digitalisasi ditentukan oleh Unit Kearsipan.
    - b. pemencaran  
pemencaran Arsip Vital Kementerian dilakukan dengan menyimpan Arsip hasil duplikasi ke Unit Kearsipan, sedangkan Arsip Vital yang asli disimpan di unit kerja Pencipta Arsip Vital.
    - c. dengan peralatan khusus (*vaulting*)  
pelindungan bagi Arsip Vital dari musibah atau bencana dilakukan dengan menggunakan peralatan penyimpanan khusus, seperti: almari besi, *filig cabinet* tahan api. Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media, dan ukuran. Namun demikian secara umum peralatan tersebut memiliki karakteristik tidak mudah terbakar (sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam kebakaran), kedap air, dan bebas medan magnet untuk jenis Arsip berbasis magnetik/elektronik.



- c. memulihkan kondisi (*recovery*) baik untuk fisik Arsip Vital maupun tempat penyimpanannya yang dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi fisik Arsip atau rekonstruksi bangunan.

2. Pemulihan (*recovery*)

- a. stabilisasi dan perlindungan Arsip yang dievakuasi  
Setelah terjadinya bencana segera mungkin dilakukan perbaikan terhadap kerusakan struktur bangunan atau kebocoran. Pengaturan stabilitas suhu udara dan kelembaban dapat dikurangi dengan pengaturan sirkulasi udara atau menggunakan kipas angin. Apabila seluruh bangunan mengalami kerusakan, maka Arsip yang sudah dievakuasi dan dipindahkan ketempat aman harus dijaga untuk mencegah kerusakan yang semakin parah, karena dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam Arsip tersebut akan ditumbuhi jamur, yang kemudian akan segera membusuk dan hancur. Sedangkan dalam musibah kebakaran, kerusakan terhadap Arsip dari jelaga, asap, racun, api, suhu udara yang sangat tinggi, dan lain-lain, harus dinetralisir sesegera mungkin dengan cara dijauhkan dari pusat bencana.
- b. penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuhan pemulihan yang berkaitan dengan operasional penyelamatan  
Penilaian dan pemeriksaan terhadap tingkat kerusakan dilakukan untuk menentukan jumlah dan jenis kerusakan, media atau peralatan apa yang terpengaruh dan ikut rusak, peralatan dan lain-lain termasuk memperhitungkan kebutuhan tenaga ahli dan peralatan untuk melakukan operasi penyelamatan.
- c. pelaksanaan penyelamatan
  - 1) pelaksanaan penyelamatan dalam bencana besar  
Penyelamatan Arsip Vital yang disebabkan oleh bencana besar perlu dibentuk tim penyelamatan yang bertanggung jawab mengevakuasi dan memindahkan Arsip ketempat yang aman,

melakukan penilaian tingkat kerusakan, mengatur proses penyelamatan termasuk tata caranya, penggantian *shift*, rotasi pekerjaan, dan mekanisme komunikasi dengan pihak- pihak terkait.

- 2) pelaksanaan penyelamatan bencana yang berskala kecil Penyelamatan Arsip Vital yang disebabkan oleh bencana yang berskala kecil cukup dilakukan oleh unit fungsional dan unit terkait. Misalnya musibah kebakaran yang terjadi di suatu kantor maka pelaksanaan penyelamatan dilakukan oleh Unit Kearsipan dibantu oleh unit keamanan dan unit pemilik Arsip.
- 3) prosedur pelaksanaan  
Pelaksanaan penyelamatan Arsip yang disebabkan oleh bencana banjir dilakukan dengan cara:
  - a) pengepakan yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan pemindahan Arsip dari lokasi bencana ke tempat yang aman. Arsip yang terkena musibah sebelumnya perlu dibungkus dan diikat (dikemas) supaya tidak tercecer, baru kemudian dipindahkan;
  - b) pembersihannya itu memilah dan membersihkan Arsip secara manual dari kotoran yang menempel pada Arsip, kemudian disiram dengan cairan alcohol atau *thymol* supaya kotoran yang menempel pada Arsip dapat terlepas dan Arsipnya tidak lengket;
  - c) pembekuan yaitu mendinginkan sampai ketinggian  $-400\text{ C}$  (minus empat puluh derajat celcius), sehingga Arsip mengalami pembekuan;
  - d) pengeringan yaitu mengeringkan menggunakan vakum pengering atau kipas angin, tidak dijemur dalam panas matahari secara langsung;
  - e) penggantian Arsip yang ada salinannya yang berasal dari tempat lain;



- f) penggandaan (*back up*) seluruh Arsip yang sudah diselamatkan; dan
- g) memusnahkan Arsip yang sudah rusak parah dengan membuat berita acara.

Sedangkan untuk volume Arsip yang sedikit, cukup dilakukan dengan cara sederhana dengan tetap menjaga suhu antara 100 C (sepuluh derajat celcius) s.d. 170 C (tujuh belas derajat celcius) dan tingkat kelembaban antara 25% s.d. 35% RH. Sedangkan penyelamatan Arsip akibat musibah kebakaran hanya dilakukan terhadap Arsip yang secara fisik dan informasi masih bisa dikenali. Pembersihan Arsip dari asap atau jelaga dilakukan dengan cara manual.

d. prosedur penyimpanan kembali

Arsip yang telah dibersihkan, dikeringkan, dan disimpan kembali ke tempat yang bersih dengan suhu dan kelembaban yang sesuai, dengan langkah-langkah:

- 1) jika tempat penyimpanan Arsip Vital tidak mengalami kerusakan, maka ruangan tersebut dibersihkan terlebih dahulu;
- 2) penempatan kembali peralatan penyimpanan Arsip Vital;
- 3) penempatan kembali Arsip; dan
- 4) Arsip Vital elektronik dalam bentuk disket, *catridge*, Cakram Padat (CD) disimpan ditempat tersendiri, dan dilakukan format ulang dan dibuat duplikasinya.

e. evaluasi

Setelah selesai melakukan kegiatan pemulihan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelamatan Arsip Vital dan penyusunan laporan. Kegiatan evaluasi juga akan bermanfaat untuk mempersiapkan kemungkinan adanya bencana di kemudian hari.



G. Ketentuan Akses Arsip Vital

Ketentuan Akses Arsip Vital terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu pengguna yang ada di lingkungan internal dan pengguna dari lingkungan eksternal instansi. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi
  - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Vital yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Vital;
    - 2) pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat dibawah pimpinan level tertinggi), yaitu Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip Vital dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tertinggi;
    - 3) pimpinan tingkat menengah (satu tingkat dibawah pimpinan level tinggi), yaitu Pejabat Eselon II dan III mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Vital dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tingkat tertinggi dan tingkat tinggi.
  - b. pelaksana kebijakan, yaitu pejabat administrator, pejabat pengawas, Arsiparis, dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Vital yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat

- tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin atau oleh sandiman.
- c. Pengawas Kearsipan internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
2. pengguna yang berhak di lingkungan eksternal
    - a. publik mempunyai hak untuk mengakses Arsip Vital setelah mendapat izin dari Menteri.
    - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip Vital pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), contohnya ketika BPK sedang dalam tugas mengaudit.
    - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip Vital pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana korupsi.

### III. PEMELIHARAAN ARSIP INAKTIF

Pemeliharaan Arsip Inaktif meliputi kegiatan:

#### A. Penataan Arsip Inaktif;

Penataan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan dilaksanakan melalui prosedur:

##### 1. Pengaturan fisik Arsip

Kegiatan pengaturan fisik Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan diawali kegiatan pemeriksaan dan verifikasi Arsip yang dipindahkan untuk memastikan kelengkapan Arsip,



kesesuaian fisik Arsip dengan daftar Arsip dengan daftar Arsip serta penyusunan daftar Arsip Inaktif. Pengaturan fisik Arsip dilakukan dengan kegiatan:

a. penataan Arsip dalam boks;

Penataan Arsip dikelompokkan berdasarkan:

- 1) media simpan dan sarana penyimpanannya;
- 2) menempatkan Arsip pada boks dengan tetap mempertahankan penataan Arsip ketika masih aktif (aturan asli) dan asal usul;
- 3) menempatkan lembar Tunjuk Silang apabila diperlukan; dan
- 4) Tunjuk Silang diperlukan apabila terdapat informasi Arsip yang saling berhubungan antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dan/atau Arsip direkam pada media yang berbeda.

b. penomoran boks dan pelabelan

- 1) membuat label boks dengan mencantumkan lokasi simpan, nomor boks dan nomor folder secara konsisten.
- 2) pemberian nomor boks dilakukan sesuai urutan nomor.

Contoh penomoran boks:

A.01.01 (ruang A, rak 1, boks nomor 1)

A.01.02 (ruang A, rak 1, boks nomor 2)

A.01.03 (ruang A, rak 1, boks nomor 3)

c. pengaturan penempatan boks pada tempat penyimpanan  
pengaturan penempatan boks arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan prinsip asal usul.

2. Pengolahan informasi Arsip

Pengolahan informasi Arsip menghasilkan daftar informasi tematik yang paling sedikit memuat judul, Pencipta Arsip, uraian hasil pengolahan, dan kurun waktu. Pengolahan informasi Arsip dilakukan untuk menyediakan bahan layanan informasi publik dan kepentingan internal lembaga, dengan cara mengidentifikasi dan menghubungkan keterkaitan Arsip dalam satu keutuhan informasi berdasarkan Arsip yang dikelola di Unit Kearsipan.



3. Penyusunan daftar Arsip Inaktif

Penyusunan daftar Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan

- a. Unit Kearsipan membuat daftar Arsip Inaktif berdasarkan daftar Arsip yang dipindahkan dari Unit Pengolah.
- b. Unit Kearsipan mengolah daftar Arsip Inaktif dengan menambahkan informasi nomor definitif folder dan boks yang diurutkan sesuai dengan *database* daftar Arsip Inaktif masing-masing *provenance* Pencipta Arsip.
- c. pembaharuan Daftar Arsip Inaktif dilakukan setiap terjadi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan Arsip paling sedikit satu tahun sekali.
- d. penyusunan daftar Arsip Inaktif memuat informasi tentang:
  - 1) Pencipta Arsip;
  - 2) Unit Pengolah;
  - 3) nomor Arsip;
  - 4) Kode Klasifikasi;
  - 5) uraian informasi Arsip/Berkas;
  - 6) kurun waktu;
  - 7) jumlah;
  - 8) tingkat perkembangan;
  - 9) keterangan (media Arsip, kondisi, dan lain-lain);
  - 10) nomor definitive folder dan boks;
  - 11) lokasi simpan (ruangan dan nomor rak);
  - 12) jangka simpan dan nasib akhir; dan
  - 13) kategori Arsip.

DAFTAR ARSIP INAKTIF

No.	Kode	Jenis Arsip	Kurun Waktu	Tingkat	Jumlah	Keterangan	Nomor Definitif	Lokasi Simpan	Jangka Simpan	Kategori Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Jabatan

Tanda tangan pejabat yang  
mengesahkan

Nama

Petunjuk Pengisian

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut Bekas/Arsip
- Kolom (2) diisi dengan Kode Klasifikasi Arsip
- Kolom (3) diisi dengan uraian jenis/series Arsip
- Kolom (4) diisi dengan kurun waktu
- Kolom (5) diisi dengan tingkat perkembangan Arsip
- Kolom (6) diisi dengan jumlah Arsip
- Kolom (7) diisi dengan media Arsip, kondisi, dll
- Kolom (8) diisi dengan nomor definitif folder dan boks
- Kolom (9) diisi dengan lokasi simpan yang mencakup ruangan dan nomor boks
- Kolom (10) diisi dengan jangka Simpan dan Nasib Akhir
- Kolom (11) diisi dengan kategori Arsip, merupakan Arsip Vital, Arsip Terjaga, dan keterangan klasifikasi dan keamanan akses (rahasia, sangat rahasia, terbatas)

Daftar Arsip Inaktif digunakan sebagai sarana penemuan kembali Arsip, dan sarana pengendalian Arsip Inaktif.

B. Penyimpanan Arsip Inaktif

Penyimpanan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan daftar Arsip Inaktif. Penyimpanan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan melakukan penataan boks Arsip pada rak secara berurut berdasarkan nomor boks dan disusun berderet ke samping (vertikal) yang dimulai dari rak yang paling atas dan diatur dari posisi kiri menuju ke kanan.

Contoh

Penataan boks pada rak dan penyimpanan Arsip Inaktif



Gambar 1. Penataan boks pada rak dan penyimpanan Arsip Inaktif

C. Prosedur penataan Arsip Inaktif yang belum memiliki daftar Arsip di Unit Pengolah

Prosedur penataan Arsip Inaktif yang belum memiliki daftar Arsip meliputi kegiatan:

1. Survei

Survei merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan terhadap fungsi lembaga Pencipta Arsip dalam rangka menentukan skema pengaturan Arsip, jumlah, media, kurun waktu, kondisi fisik Arsip, sistem pemberkasan, dan kebutuhan sumber daya lainnya. Kegiatan Survei menghasilkan proposal penataan Arsip Inaktif.

2. Pembuatan daftar ikhtisar Arsip

Pembuatan daftar ikhtisar Arsip yang merupakan acuan dalam memindahkan/evaluasi Arsip yang akan dilakukan penataan ke tempat yang telah disiapkan.

3. Pembuatan skema pengaturan Arsip

Pembuatan skema Arsip adalah analisis terhadap fungsi dan kegiatan Pencipta Arsip dari unit kerja untuk dasar pembuatan kerangka pengelompokan fisik dan informasi Arsip sebagai dasar untuk menyusun kartu – kartu deskripsi



(*fisches*). Penyusunan skema Arsip berdasarkan Pola Klasifikasi, Struktur organisasi, tugas dan fungsi, dekripsi, atau kombinasi.

#### 4. Rekonstruksi

Rekonstruksi Arsip dilakukan untuk mewujudkan kesatuan fisik dan informasi Arsip melalui kegiatan pemilihan Arsip dan pemberkasan Arsip. Pemilihan Arsip dilakukan dengan cara:

- a) mengelompokkan Arsip sesuai dengan prinsip asal – usul (*provenance*) pencipta sampai dengan level 2 di struktur organisasi:
  - 1) Konteks, dilihat dari kepada, tembusan surat.
  - 2) Konten, dilihat dari isi substansi surat.
- b) pilihan antara Arsip dan nonarsip (tidak cocok dengan rekonstruksi)
  - 1) Arsip (termasuk Arsip duplikasi);
  - 2) Nonarsip: formulir kosong, majalah, buku, map kosong.
  - 3) Arsip yang sudah dipilah diberkaskan sesuai klasifikasi (kesamaan kegiatan).
  - 4) Arsip yang sudah memberkas dipertahankan sesuai dengan keutuhannya (tidak berlaku untuk Arsip korespondensi yang tercampur dalam satu ordner), contoh:
    - (a) Arsip Korespondensi : pemberkasan sesuai dengan series atau kegiatan;
    - (b) Arsip Keuangan : pemberkasan dengan Berkas SPM atau SP2D;
    - (c) Arsip personel file : pemberkasan sesuai NIP atau NIK; dan
    - (d) Arsip pengadaan barang dan jasa pemberkasan sesuai nama protek atau paket.
  - 5) pemberkasan Arsip merupakan kegiatan penyusunan kelompok Arsip sesuai dengan skema

pengaturan Arsip yang telah ditetapkan.

Pemberkasan dapat dilakukan berdasarkan:

- (a) Series;
- (b) Rubik; dan
- (c) Dossier.

5. Pendeskripsian

Pendeskripsian merupakan kegiatan perekaman isi informasi yang ada pada setiap item/Berkas Arsip. Pendeskripsian Arsip memuat informasi sebagai berikut:

- a) unit pencipta;
- b) bentuk redaksi;
- c) isi informasi;
- d) kurun waktu atau periode;
- e) tingkat keaslian;
- f) perkembangan;
- g) jumlah atau volume;
- h) keterangan khusus;
- i) ukuran (Arsip bentuk khusus); dan
- j) nomor sementara dan nomor definitif.

Cara pengisian lembar deskripsi sebagai berikut:

- a) kode pelaksana dan nomor deskripsi;
- b) uraian;
- c) kurun waktu: tahun penciptaan Arsip;
- d) tingkat perkembangan: pilih asli/kopi;
- e) media simpan: pilih kertas/peta;
- f) kondisi fisik: pilih baik/rusak;
- g) jumlah folder: satuan folder;
- h) nomor boks: nomor boks sementara;
- i) duplikasi: pilih ada/tidak.

6. Manuver (pengolahan data dan fisik Arsip)

Manuver kartu deskripsi (mengolah data), merupakan proses menggabungkan kartu deskripsi atau data Arsip yang mempunyai kesamaan masalah, mengurutkan sesuai dengan skema serta memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi sebagai nomor penyimpanan Berkas. Manuver fisik merupakan proses penyusunan Berkas berdasarkan nomor definitif Arsip sesuai dengan skema.



7. Penataan Arsip dan Boks

- a) Arsip dimasukkan ke dalam folder dan diberi kode masalah/subjek Arsip dan nomor urut Arsip sesuai nomor definitif.
- b) menyusun Arsip ke dalam boks secara kronologis dimulai dari nomor terkecil berada pada susunan paling belakang.
- c) membuat label pada boks, berisi nomor boks, nomor folder, serta lokasi simpan.
- d) apabila jumlah Arsip dalam satu Berkas sangat banyak, maka Arsip dapat disimpan lebih dari satu folder.

8. Pembuatan daftar Arsip Inaktif

Pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan berdasarkan deskripsi Arsip yang disusun secara kronologis berkelompok Berkas. Daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan memuat informasi: Pencipta Arsip, Unit Pengolah, nomor, kode, uraian informasi Arsip, kurun waktu, jumlah, media, dan keterangan.

Penataan Arsip Inaktif yang belum memiliki Daftar Arsip oleh Unit Pengolah menghasilkan tertatanya fisik Arsip dan tersedianya Daftar Arsip sehingga dapat dilakukan pemindahan Arsip Inaktif kepada Unit Kearsipan sesuai prosedur Penyusutan Arsip.

#### IV. PROSEDUR DAN TEKNIS ALIH MEDIA ARSIP

Prosedur teknis alih media Arsip melalui digitalisasi meliputi:

- a. penyeleksian atau penilaian Arsip yang akan dilakukan alih media.  
Penyeleksian atau penilaian Arsip yang akan dilakukan alih media memperhatikan kondisi dan nilai informasi Arsip.
- b. pemindaian (*scanning*) Arsip;  
Dalam kegiatan alih media kertas keelektronik (digitalisasi), pemindaian dapat dilakukan dengan alat pemindai yaitu *scanner*. Proses pemindaian dilakukan dengan hasil disesuaikan pada format TIFF yaitu format image tanpa kompresidan resolusi pada 600 dpi untuk perlindungan Arsip. Pemindaian Arsip asli direkomendasikan untuk menggunakan resolusi minimum 300 dpi (dot per inch) dan disimpan dalam bentuk dokumen elektronik



dalam format tertentu seperti TIFF, GIF, JPEG, PNG, dan PDF. Arsip Elektronik tersebut harus memiliki informasi yang sama seperti dokumen aslinya.

- c. penyusunan berita acara dan daftar Arsip alih media; dan
- d. pelaksanaan autentikasi Arsip hasil alih media.

Unit Kearsipan dalam melaksanakan alih media harus membuat berita acara dan daftar Arsip alih media sebagai berikut:

Contoh berita acara:

<b>BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP</b>	
Nomor : .....	
Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun.....	
yang bertandatangan dibawah ini:	
NAMA	:
NIP	:
PANGKAT/GOL	:
JABATAN	:
Telah melaksanakan alih media Arsip Biro Hukum Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam daftar Arsip alih media. Dari hasil alih media tersebut juga telah dilakukan autentikasi berupa pemberian <i>watermark</i> pada Arsip hasil alih media sebagai tanda bahwa telah sesuai dengan aslinya.	
Dibuat di .....(tempat), .....(tanggal)	
KEPALA UNIT KEARSIPAN (Jabatan)	
ttd	
Nama tanpa gelar	

## V. PROSEDUR PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Kegiatan pemindahan Arsip Inaktif meliputi kegiatan:

### A. Penyeleksian Arsip Inaktif

Penyeleksian Arsip Inaktif dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi aktif. Dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampaui, maka Arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi penggunaan Arsip yang telah menurun ditandai dengan penggunaan kurang dari 5 (lima) kali dalam setahun.

### B. Penataan Arsip Inaktif

Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan 2 (dua) asas, yaitu:

1. asas “asal usul” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga Arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta Arsip (*provenance*), tidak dicampur dengan Arsip yang berasal dari Pencipta Arsip lain, sehingga Arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya; dan
2. asas “aturan asli” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga Arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (*original order*) atau sesuai dengan pengaturan ketika Arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip.

Penataan Arsip Inaktif pada Unit Pengolah dilaksanakan melalui kegiatan:

1. pengaturan fisik Arsip;
2. pengolahan informasi Arsip; dan
3. penyusunan daftar Arsip Inaktif.

Penataan Arsip Inaktif yang dipindahkan ke dalam boks, dengan rincian kegiatan:

1. menata folder/Berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan dipindahkan yang diurutkan berdasarkan nomor urut daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;
2. menyimpan dan memasukkan folder/Berkas Arsip Inaktif ke dalam boks Arsip;

3. memberi label boks Arsip dengan keterangan: nomor boks, nama Unit Pengolah, nomorurut Arsip, dan tahun penciptaan Arsip.

Penataan Arsip Inaktif dan pembuatan daftar Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengolah.

C. Pembuatan daftar Arsip Inaktif.

Pencipta Arsip menyusun daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah/Unit Kerja selaku yang memindahkan Arsip dan Unit Kearsipan di lingkungan Pencipta Arsip selaku penerima Arsip atau pejabat yang diberi kewenangan.

Daftar Arsip Inaktif paling sedikit memuat:

1. Pencipta Arsip;
2. Unit Pengolah;
3. nomor Arsip;
4. Kode Klasifikasi;
5. uraian informasi Arsip;
6. kurun waktu;
7. jumlah; dan
8. keterangan.

Kelengkapan Pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan

1. Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan ke Unit Kearsipan

Contoh:

DAFTAR ARSIP YANG DIPINDAHKAN

Unit Kerja: .....							
No.	Kode Klasifikasi	Jenis/ Series Arsip	Tahun	Jumlah	Tingkat Perkembangan	Nomor Doks	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Yang Memindahkan				Yang Menerima			
(unit kerja)				(unit kerja)			
Nama Jabatan				Nama Jabatan			
ttd				ttd			
Nama jelas				Nama jelas			



Petunjuk Pengisian

- (1) Nomor Berisi nomor urut jenis Arsip
- (2) Kode Klasifikasi Berisi tanda pengenal Arsip yang dapat membedakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain
- (3) Jenis/Series Arsip Berisi jenis/series Arsip
- (4) Tahun Berisi tahun terciptanya Arsip
- (5) Jumlah Berisi jumlah Arsip dalam setiap jenis Arsip (eksemplar/folder/boks)
- (6) Tingkat Berisi tingkat perkembangan Arsip (asli/salinan/tembusan). Bila terdiri dari beberapa tingkat perkembangan dicantumkan seluruhnya
- (7) Nomor Boks Berisi nomor yang memuat lokasi pada boks berapa jenis Arsip disimpan
- (8) Keterangan Berisi kekhususan Arsip (kertas rapuh/Berkas tidak lengkap/lampiran tidak ada)

- 2. Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif paling sedikit memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis Arsip yang dipindahkan, jumlah Arsip, pelaksana dan penandatanganan oleh pimpinan Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan

Contoh:

<p>BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF NOMOR ...../...../TU.220/...../20....</p>	
<p>Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang bertandatangan dibawah ini, berdasarkan JRA dan berdasarkan penilaian kembali Arsip telah melaksanakan pemindahan Arsip..... sebanyak..... tercantum dalam Daftar Arsip yang dipindahkan sebagaimana terlampir.</p> <p>Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.</p>	
<p>Dibuat di....., ..... (tanggal)</p>	
Yang memindahkan	Yang Menerima
(unit kerja)	(unit kerja)
Nama Jabatan	Nama Jabatan
td	td
Nama jelas	Nama jelas

3. Dalam hal pemindahan Arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan ke unit depot penyimpanan Arsip Inaktif yang dikelola oleh ANRI atau Pemindahan Arsip Inaktif di lingkungan Pencipta Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, pendokumentasian proses pemindahan dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemindahan Arsip.

## VI. PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP

Prosedur Pemusnahan Arsip oleh Pencipta Arsip melalui tahapan sebagai berikut:

### A. Pembentukan Panitia Penilai Arsip

Pembentukan panitia penilai Arsip ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip. Panitia penilai Arsip bertugas untuk melakukan penilaian Arsip yang akan dimusnahkan. Panitia penilai Arsip berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya memenuhi unsur:

1. pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
2. pimpinan Unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota;
3. Arsiparis sebagai anggota;
4. pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
5. pimpinan Unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
6. Arsiparis sebagai anggota.

### B. Penyeleksian Arsip

Penyeleksian Arsip dilakukan oleh panitia penilai Arsip melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka Arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai Arsip usul musnah.

### C. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah

Hasil penyeleksian Arsip dituangkan dalam daftar Arsip usul musnah. Daftar Arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi

nomor, jenis Arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan.

Contoh:

DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH

NO	JENIS ARSIP	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN

Keterangan:

Nomor : berisi nomor urut

Jenis/Series Arsip : berisi jenis/series Arsip

Tahun : berisi tahun pembuatan Arsip

Jumlah : berisi jumlah Arsip

Tingkat Perkembangan : berisi tingkatan keaslian Arsip (asli atau salinan)

Keterangan : berisi informasi tentang kondisi Arsip (misalnya rusak/tidak lengkap/ berbahasa asing/daerah)

D. Penilaian Arsip

Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar Arsip usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai Arsip.



Contoh:

SURAT PERTIMBANGAN PANITIA PENILAI ARSIP	
Berkenaan dengan permohonan persetujuan Pemusnahan Arsip di..... (nama unit kerja)..... berdasarkan Surat ..... (pejabat pengirim surat) ..... Nomor: ..... tanggal....., dalam hal ini telah dilakukan penilaian dari tanggal.....s/d....., terhadap daftar Arsip yang diusulkan musnah dengan menghasilkan pertimbangan:	
a. menyetujui usulan Pemusnahan Arsip sebagaimana terlampir; atau	
b. menyetujui usulan Pemusnahan Arsip, namun ada beberapa Berkas yang dipertimbangkan agar tidak dimusnahkan dengan alasan tertentu..... sebagi manaterlampir.	
Adapun sebagai dasar dari pertimbangan usulan Pemusnahan Arsip adalah	
a. tidak memiliki nilai guna;	
b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;	
c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan	
d. pada saat penilaian, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.	
Demikian hasil pertimbangan panitia penilai Arsip, dengan harapan permohonan persetujuan usul Pemusnahan Arsip dapat ditindaklanjuti dengan cepat melalui prosedur yang telah ditetapkan.	
.....(nama kota), ..... (tanggal, bulan, tahun)	
1. Ketua	..... (...NIP..., ...jabatan.....)
2. Anggota	..... (...NIP..., ...jabatan.....)
3. Anggota	..... (...NIP..., ...jabatan.....)
4. Anggota	..... (...NIP..., ...jabatan.....)
5. Anggota	..... (...NIP..., ...jabatan.....)

E. Permintaan Persetujuan Pemusnahan

Pemusnahan Arsip dilingkungan lembaga negara harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. Proses permohonan persetujuan/pertimbangan Pemusnahan Arsip harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menyampaikan surat permohonan persetujuan/pertimbangan dari pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI;

2. menyampaikan daftar Arsip usul musnah berupa salinan cetak dan salinan elektronik; dan
3. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai Arsip.

F. Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan

Penetapan terhadap Arsip yang akan dimusnahkan diusulkan oleh Unit Kearsipan I kepada Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala ANRI dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip.

G. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

Pelaksanaan Pemusnahan Arsip memperhatikan ketentuan:

1. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip musnah dan tidak dapat dikenali;
2. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit kerja bidang hukum dan/atau pengawas Kearsipan internal dari lingkungan Pencipta Arsip yang bersangkutan; dan
3. disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar Arsip yang dimusnahkan.

Pelaksanaan Pemusnahan Arsip dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan beserta daftar Arsip usul musnah yang dibuat rangkap 2 (dua). Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Pemusnahan Unit Kearsipan I, Anggota Tim dan disaksikan sekurang-kurangnya dari unit kerja bidang hukum dan/atau pengawas internal Kearsipan.

Contoh:

<b>BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP</b>	
Nomor :.....	
<p>Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan surat persetujuan ANRI nomor ..... dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor ..... telah melaksanakan Pemusnahan Arsip ..... yang dimusnahkan terlampir ..... lembar.</p>	
<p>Pemusnahan Arsip secara total dengan cara .....*)</p>	
Saksi-Saksi	Kepala Unit Kearsipan
1. (Kepala Unit Pengolah)	.....
2. (Unit Hukum)	.....
3. (Pengawas Kearsipan Internal)	.....
<p>Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan Pemusnahan Arsip wajib disimpan oleh Pencipta Arsip, meliputi:</p>	
a. keputusan pembentukan tim penilai kegiatan Pemusnahan Arsip;	
b. notulen rapat panitia penilai Pemusnahan Arsip pada saat melakukan penilaian;	
c. surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa Arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;	
d. surat persetujuan Pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI untuk pemusnahan;	
e. Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip;	
f. berita acara Pemusnahan Arsip; dan	
g. daftar Arsip yang dimusnahkan.	
*) Keterangan:	
Pemusnahan Arsip dapat dilakukan dengan cara, antara lain:	
a. pencacahan;	
b. penggunaan bahan kimia;	
c. <i>pulping</i> ; dan	
d. pembakaran.	



## VII. PROSEDUR PENYERAHAN ARSIP STATIS

Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:

### A. Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah

Penyeleksian Arsip Statis dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan permanen, maka Arsip tersebut telah memasuki masa Arsip usul serah. Hasil penyeleksian Arsip dituangkan dalam daftar Arsip usul serah. Daftar Arsip usul serah sekurang-kurangnya berisi: nomor, Kode Klasifikasi, uraian informasi Arsip, kurun waktu, jumlah Arsip, dan keterangan.

Contoh:

DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN					
Nama Pencipta		: .....			
Alamat		: .....			
No.	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Kurun Waktu	Jumlah Arsip	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
..... (tempat), tanggal, tahun .....					
Yang mengajukan Pimpinan Pencipta Arsip			Menyetujui, Kepala ANRI		
ttd			ttd		
(nama jelas)			(nama jelas)		

Petunjuk pengisian:

- (a) Nama Pencipta : Diisi nama Pencipta Arsip
- (b) Alamat : Diisi alamat Pencipta Arsip
- (1) Nomor : Nomor urut
- (2) Kode Klasifikasi : Kode Klasifikasi Arsip (apabila memiliki Klasifikasi Arsip)
- (3) Uraian Informasi Arsip : Uraian informasi yang terkandung dalam Arsip
- (4) Kurun Waktu : Kurun waktu terciptanya Arsip
- (5) Jumlah Arsip : Jumlah Arsip (lembaran, Berkas)
- (6) Keterangan : Informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, Berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian, dan sebagainya

#### B. Penilaian

Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar Arsip usul serah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip dan selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai Arsip.

#### C. Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis

Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada ANRI sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.

Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menyampaikan surat permohonan penyerahan Arsip Statis dari pimpinan Pencipta Arsip kepada ANRI sesuai wilayah kewenangannya;
2. menyampaikan daftar Arsip usul serah; dan
3. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai Arsip.

D. Verifikasi dan Persetujuan

Kepala ANRI sesuai wilayah kewenangannya melakukan verifikasi daftar Arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan Arsip Statis dari Pencipta Arsip. Kepala ANRI sesuai wilayah kewenangannya dapat memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar Arsip usul serah terhadap Arsip yang diterima atau ditolak kepada Pencipta Arsip. Kepala ANRI sesuai wilayah kewenangannya memberikan persetujuan atas daftar Arsip usul serah dari Pencipta Arsip.

E. Penetapan Arsip yang Akan Diserahkan

Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan penetapan terhadap Arsip yang akan diserahkan kepada ANRI sesuai wilayah kewenangannya dengan mengacu pada persetujuan dari Kepala ANRI.

F. Pelaksanaan Serah Terima Arsip Statis

Pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI dengan disertai berita acara, daftar Arsip usul serah dan fisik Arsip yang akan diserahkan.

Susunan format berita acara meliputi:

1. Kepala, memuat logo, judul, dan hari/tanggal/tahun, tempat pelaksanaan penandatanganan, nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara;
2. batang tubuh, memuat kegiatan yang dilaksanakan, termasuk bilamana ada klausul perjanjian antara kedua pihak khususnya mengenai hak akses Arsip Statis; dan
3. kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau pihak yang dikuasakan olehnya, serta tanda tangan para pihak yang melakukan penandatanganan naskah berita.

## VIII. PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN

A. Umum

1. Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
  - a. gedung;
  - b. ruangan; dan



- c. peralatan.
2. Persyaratan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud diatas mengatur lokasi, konstruksi, tata ruangan gedung, ruangan penyimpanan Arsip, serta spesifikasi peralatan Pengelolaan Arsip.
3. Standar sarana berupa bangunan gedung penyimpanan Arsip dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

## B. Prasarana dan Sarana

### 1. Standar Minimal Gedung Penyimpanan Arsip Inaktif

#### a. Lokasi

- 1) lokasi gedung penyimpanan Arsip dapat berada di lingkungan kantor atau di luar lingkungan kantor;
- 2) lokasi gedung penyimpanan Arsip berada di daerah yang jauh dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan fisik dan informasi Arsip antara lain: area penyimpanan bahan kimia, dapur, unit AC, atau kamar mandi yang bukan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan Arsip;
- 3) jalan masuknya terkontrol dan terhindar dari unsur-unsur yang mengganggu keamanan Arsip.

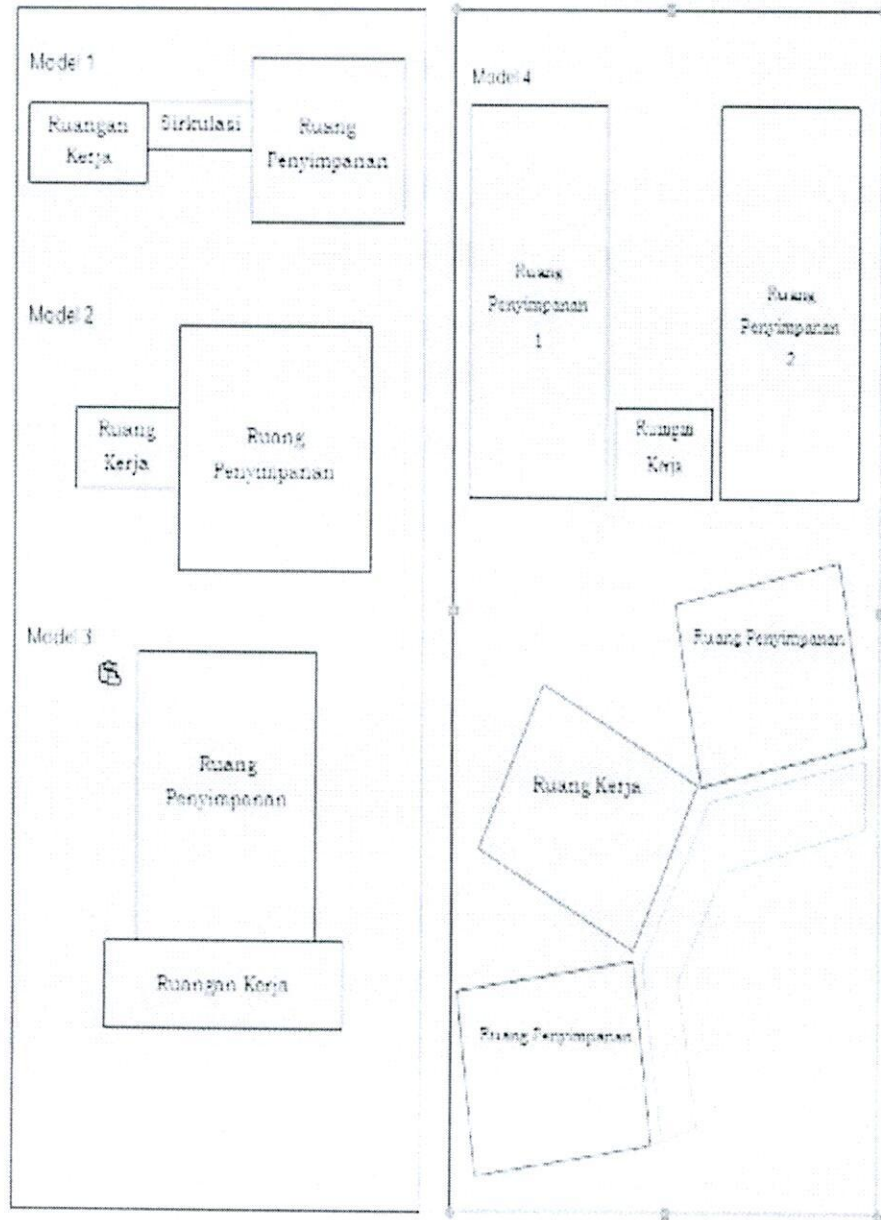
#### b. Kontrol Lingkungan

Kontrol lingkungan dilakukan secara tepat sesuai dengan retensinya/jangka waktu simpan Arsip, sebagai berikut:

- 1) untuk menjaga kondisi fisik Arsip tetap baik, suhu dijaga agar tidak melebihi 27°C dan mempunyai kelembaban tidak lebih dari 60%;
- 2) jendela tidak diutamakan, apabila jendela tidak bisa dihindari sebaiknya memasang tirai;
- 3) lingkungan harus bersih dari kontaminasi industri atau gas; dan
- 4) ruang penyimpanan Arsip media magnetik harus terlindung dari medan magnet.

- c. Gedung Penyimpanan Arsip Inaktif di Luar Lingkungan Kantor, perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
  - 1) hindari daerah atau lokasi yang memiliki kandungan polusi udara tinggi, bekas hutan dan perkebunan, rawan kebakaran, rawan banjir, dan yang berdekatan dengan keramaian/pemukiman penduduk atau pabrik; dan
  - 2) mudah dijangkau untuk pengiriman, penggunaan maupun transportasi pegawai, serta mudah diakses informasinya.
- d. Konstruksi
  - 1) konstruksi gedung penyimpanan Arsip Inaktif dibuat untuk dapat bertahan dari cuaca dan tidak mudah terbakar, menggunakan bahan-bahan bangunan yang tidak mendatangkan rayap maupun binatang perusak lainnya; dan
  - 2) apabila bangunan bertingkat, masing-masing lantai ruang simpan Arsip tingginya 260-280 cm, namun jika bangunan tidak bertingkat, tinggi ruangan disesuaikan dengan tinggi rak yang digunakan.
- e. Tata Ruang
  - 1) tata ruang gedung penyimpanan Arsip Inaktif pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua) yaitu:
    - a) ruangan kerja  
ruangan kerja merupakan ruangan yang digunakan untuk kegiatan menerima Arsip yang baru dipindahkan, membaca Arsip Inaktif, mengolah Arsip Inaktif, memusnahkan Arsip yang tidak bernilai guna, dan ruangan-ruangan lain yang digunakan untuk bekerja.
    - b) ruangan penyimpanan Arsip Inaktif  
ruang penyimpanan Arsip Inaktif digunakan khusus untuk menyimpan Arsip sesuai dengan jenis dan medianya yang suatu saat akan dimusnahkan kecuali ruangan kerja dan ruang penyimpanan Arsip Inaktif, dimungkinkan

dilengkapi ruangan-ruangan lain seperti toilet, mushola, dan wastafel untuk mencuci tangan. Fasilitas semacam ini sangat tergantung dari kemampuan unit/satuan kerja.



Gambar 1. Pemisahan ruang kerja dengan ruang penyimpanan

- 2) apabila fasilitas proteksi Arsip Vital dan Arsip permanen berada di gedung penyimpanan Arsip Inaktif, ruang penyimpanan didesain khusus yang tahan api dan memiliki alat pengatur suhu serta kelembaban tersendiri.



- 3) Arsip bentuk khusus seperti foto, video, rekaman suara, dan media simpan Arsip Elektronik dapat disimpan di ruang penyimpanan Arsip Vital dan Arsip permanen.

2. Standar Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif

a. Beban Muatan

Bahan muatan ruang penyimpanan Arsip Inaktif didasarkan pada berat rak dan Arsip yang disimpan. Kekuatan lantai ruang simpan harus mempertimbangkan berat rak dan Arsip. Sebagai dasar perhitungannya:

- 1) satuan volume Arsip adalah meter linear (ML);
- 2) 1 ML Arsip rata-rata= 50 kg;
- 3) 1 M<sup>3</sup> Arsip rata-rata= 600 kg; dan
- 4) 1 M<sup>3</sup> Arsip = 12 ML Arsip.

b. Kapasitas Ruang Simpan

- 1) luas ruang simpan Arsip Inaktif pada dasarnya sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan instansi;
- 2) rata-rata setiap 200 M<sup>2</sup> ruang simpan Arsip dengan ketinggian 260 cm dapat menyimpan 1.000 meter linear Arsip dengan menggunakan rak konvensional (rak statis, *stationary stacks*);
- 3) penyimpanan dengan rak yang padat (*compact shelving, roll o'pact. mobile stacks*, rak bergerak) dapat menyimpan 1.800 meter linear Arsip.

c. Suhu dan Kelembaban

Untuk mengatasi masalah suhu dan kelembaban secara teknis dapat dilakukan dengan cara:

- 1) pemeriksaan secara periodic menggunakan alat *hygrometer*;
- 2) menjaga sirkulasi udara berjalan lancar;
- 3) menjaga suhu udara tidak lebih dari 270°C dan kelembaban tidak lebih dari 60%;
- 4) rak Arsip yang digunakan harus dapat menjamin sirkulasi udara yang cukup;
- 5) hindari penggunaan rak yang padat;

- 6) menjaga langit-langit, dinding, dan lantai tidak berlobang dan tetap rapat;
  - 7) pondasi didesain untuk menjaga uap atau udara lembab naik ketembok Karena daya resapan kapiler;
  - 8) hindari menanam pohon dan kayu-kayuan di dekat gedung;
  - 9) menjaga ruang agar tetap bersih dari kontaminasi gas/lingkungan agar tidak mudah timbul jamur yang akan merusak Arsip;
  - 10) kondisi Arsip dan peralatannya yang terkena jamur atau korosi, untuk segera diadakan perbaikan; dan
  - 11) standar suhu dan kelembaban untuk ruang simpan Arsip fasilitasi proteksi Arsip Vital dan Arsip permanen serta Arsip bentuk khusus, perlu diatur suhu ruangnya tidak lebih dari 20°C dan kelembaban tidak lebih dari 50%.
- d. Cahaya dan Penerangan
- Cahaya dan penerangan tidak menyilaukan, berbayang, dan sangat kontras. Sinar matahari tidak boleh langsung mengenai Arsip. Jika cahaya masuk melalui jendela tidak dapat dihindari, maka dapat diberi tirai penghalang cahaya matahari.
- e. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Serangga dan Cuaca
- Rayap dan segala macam varietasnya sering merusak bangunan yang terbuat dari kayu, oleh karena itu bangunan tempat penyimpanan Arsip Inaktif dianjurkan untuk tidak menggunakan kayu;
- f. Lantai bangunan dianjurkan untuk disuntik dengan DDT atau *gammexane* atau *penthaeclorophenol* hingga kedalaman 50 cm (lima puluh sentimeter), karena rayap pada umumnya hidup dalam tanah sampai pada kedalaman 50 cm (lima puluh sentimeter); dan
- g. pondasi gedung didesain secara kuat untuk mendukung dinding yang kuat sehingga mampu menahan terpaan angin kencang dan hujan deras. Jendela-jendela dan



pintu-pintu diperkuat dengan metode tertentu untuk mencegah terpaan hujan deras dan tampias air.

3. Standar Peralatan Arsip Inaktif

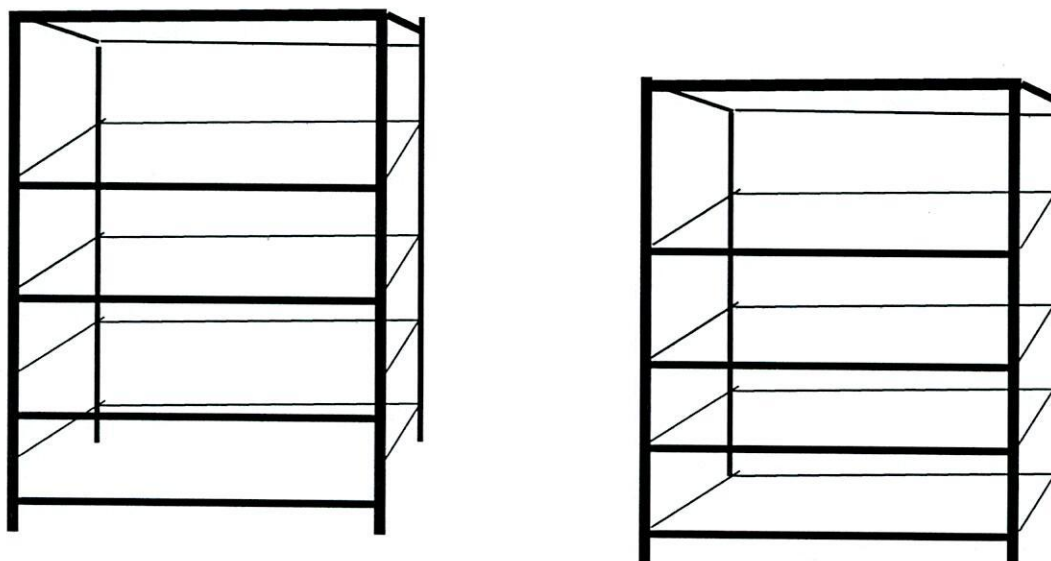
a. Rak Arsip

- 1) tinggi rak (rak statis) disesuaikan dengan ketinggian atap ruang penyimpanan Arsip Inaktif. Ruang penyimpanan dengan ketinggian atap 260 cm - 280 cm dipergunakan rak Arsip setinggi 200 cm - 220 cm;
- 2) jarak antara rak dan tembok 70 cm - 80 cm;
- 3) rak Arsip sebaiknya terbuat dari metal yang tidak mudah berkarat;
- 4) perbandingan keuntungan dan kerugian penggunaan rak statis dengan *roll o'pact* adalah sebagai berikut:

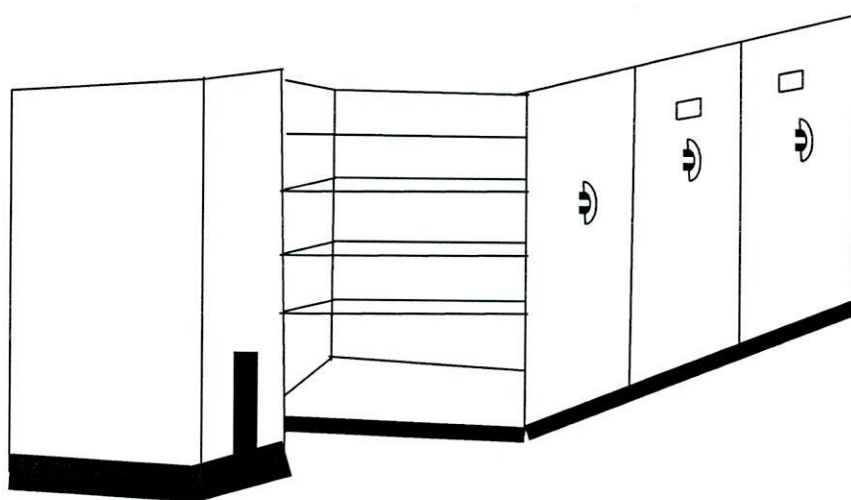
Rak	<i>rollo'pact</i>
Volume Arsip yang disimpan lebih sedikit	Volume Arsip yang disimpan lebih banyak
dapat diakses secara bersamaan	tidak dapat diakses secara bersamaan
dapat menyesuaikan dengan ketinggian ruangan karena sudah standar	Tidak dapat menyesuaikan dengan ketinggian ruangan karena sudah standar
harga relatif lebih murah	harga relatif lebih mahal
konstruksi beban muatan lebih standar	diperlukan konstruksi beban muatan lebih kuat
sirkulasi udara berjalan dengan lancar	tidak menjamin sirkulasi udara berjalan dengan lancar

- 5) rak, peralatan, dan perlengkapan lainnya harus dijamin aman, mudah di akses, dan terlindung dari hama.
- 6) bentuk rak Arsip dan *roll o'pact* sebagaimana tercantum pada Gambar 2. dan Gambar 3.





Gambar 2. Rak Statis

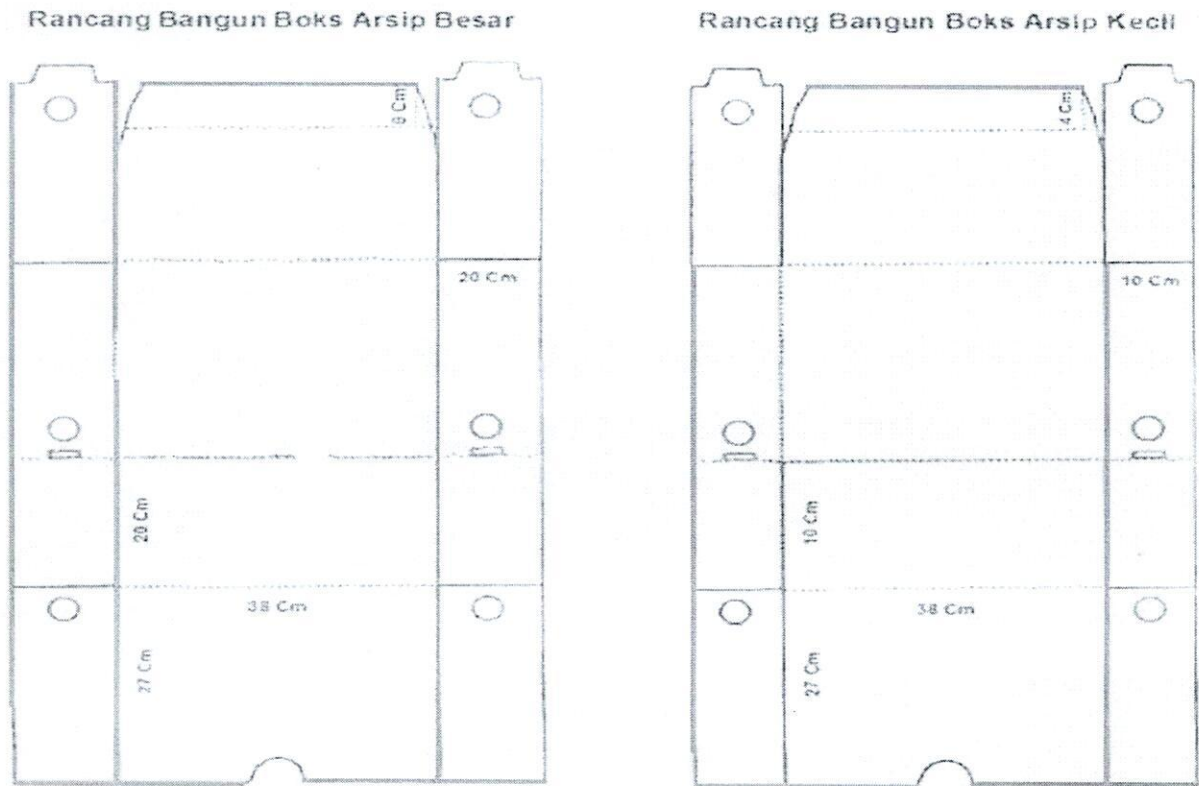


Gambar 3. *Roll o'pact*

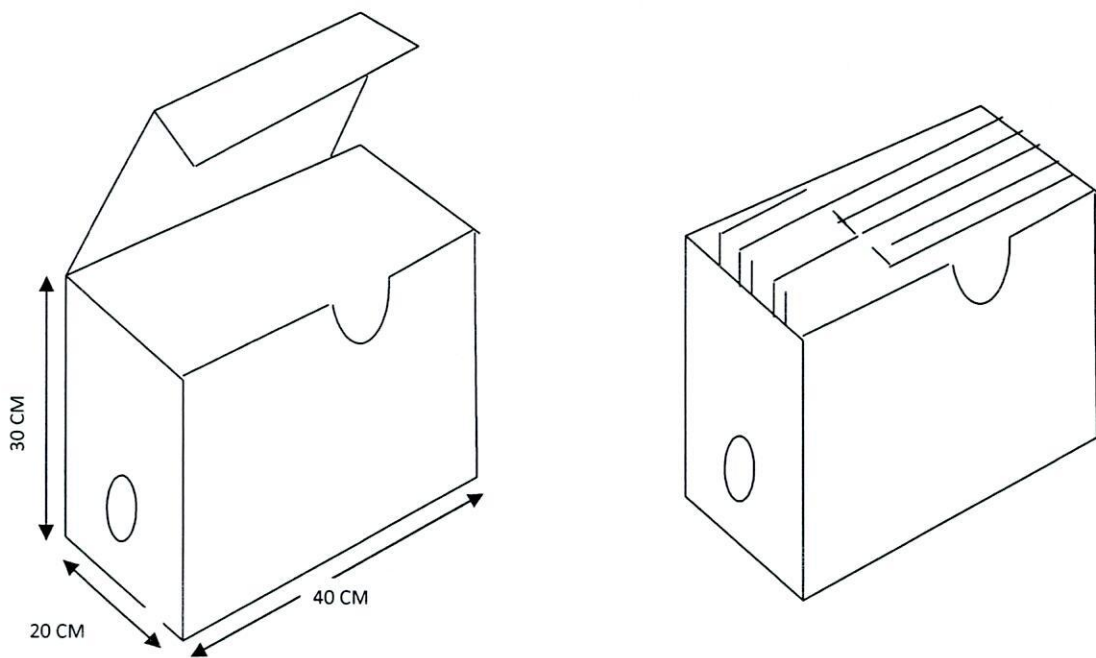
b. Boks Arsip

- 1) dipergunakan boks Arsip dengan ukuran kecil (40 cm x 10 cm x 30 cm) atau ukuran besar (40 cm x 20 cm x 30 cm);
- 2) boks Arsip dibuat dari bahan kardus dan memiliki lubang sirkulasi udara, dan memiliki penutup untuk menjamin kebersihan;
- 3) bahan boks Arsip terbuat dari karton gelombang, yaitu karton yang dibuat dari beberapa lapisan kertas medium bergelombang dengan kertas lainer sebagai penyekat dan pelapisnya; dan

- 4) hindari penggunaan boks dari bahan plastic karena menyebabkan lembab. Rancang bangun dan bentuk boks Arsip sebagaimana tercantum pada Gambar 4. dan Gambar 5.



Gambar 4. Rancang bangun boks Arsip

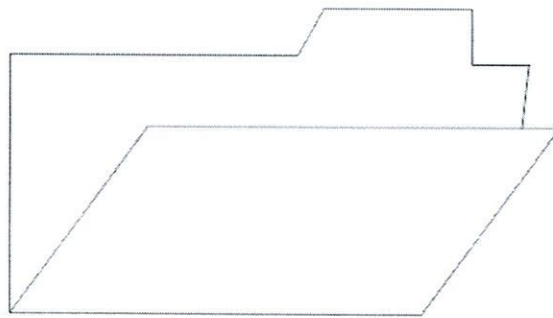


Gambar 5. Boks Arsip

c. Folder Arsip

- 1) bentuk folder seperti map, tetapi tanpa daun penutup pada sisinya, dan di atasnya terdapat bagian yang menonjol yang juga disebut tab. Tab gunanya untuk menulis title dan Kode Klasifikasi;
- 2) ukuran folder yaitu panjang 35,5cm, lebar 24 cm ditambah 1 cm untuk lipatan. Panjang tab folder 8 cm, lebar tab folder 1,5 cm; dan
- 3) bahan folder Arsip terbuat dari lembar kertas manila karton.

Bentuk folder Arsip sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



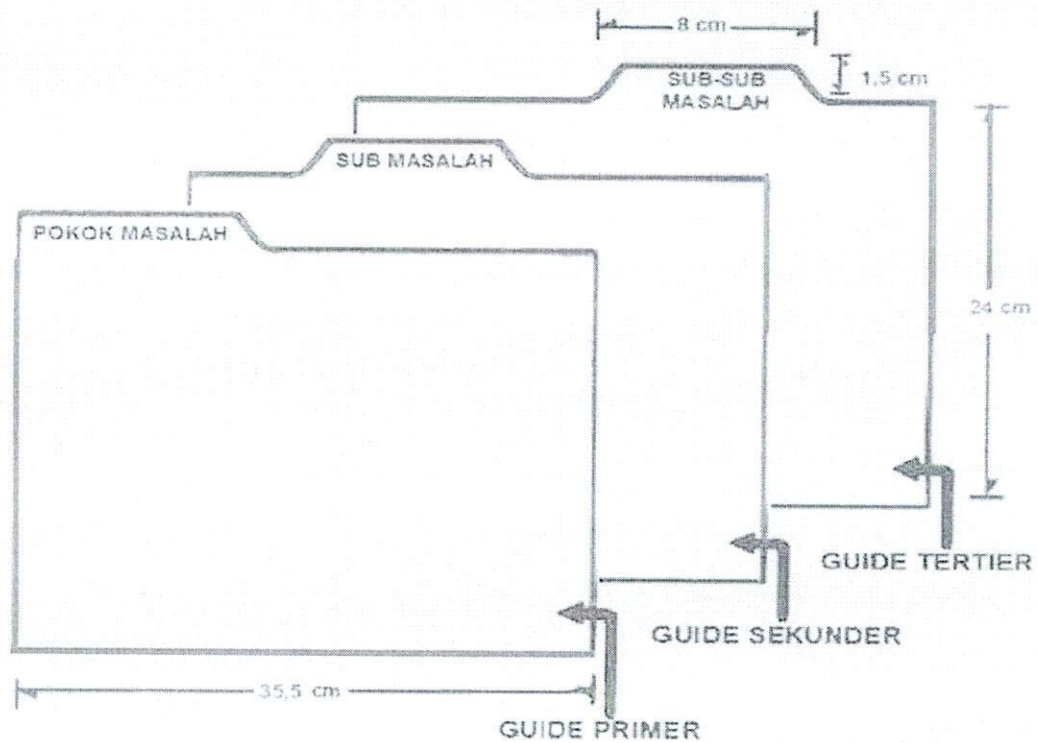
Gambar 6. Folder Arsip

d. *Guide* (sekat) Arsip

- 1) bentuknya segi empat dan terdapat bagian yang menonjol yang juga disebut tab. Tab gunanya untuk menulis Kode Klasifikasi;
- 2) ukuran *guide* yaitu panjang 35,5 cm, lebar 24cm. Panjang tab *guide* 8 cm, lebar tab *guide* 1,5 cm;
- 3) dibuat dari kertas karton mm lebih tebal dari bahan folder sehingga tidak mudah melengkung (terlipat); dan
- 4) klasifikasi menurut penggunaan *guide* adalah sebagai berikut:
  - (a) *guide* primer (dipergunakan untuk pokok masalah);
  - (b) *guide* sekunder (dipergunakan untuk sub masalah); dan



- (c) *guide* tertier (dipergunakan untuk sub-sub masalah). Bentuk *guide* Arsip sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Guide Arsip (sekat)

- e. Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Api atau Kebakaran

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya api/kebakaran alat pemadam api dengan menggunakan:

- 1) *fire alarm system* dan *fire fight system*;
- 2) tabung pemadam dan *heat/smoke detection*; dan
- 3) *hydrant* dalam gedung dan luar gedung.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya



Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI